

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian**

Pemahaman mengenai kontribusi fiskal daerah dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan memerlukan pemahaman empiris yang lebih detail. Ketimpangan pendapatan yang terjadi dan tidak adanya kriteria efisiensi dalam penentuan belanja pemerintah, merupakan sebagian dari penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak disertai dengan peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sebelum memasuki bagian hasil penelitian, pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi eksisting variabel data yang digunakan dalam penelitian.

##### **4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat**

Pertumbuhan ekonomi adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta, pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto (Mankiw, 2004). Suatu negara atau daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDB atau PDRB riil di negara atau daerah tersebut dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pada

tabel berikut, dijelaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan urutan tertinggi hingga terendah selama 2010-2015.

**Tabel 4–1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat  
2010-2015**

No	Provinsi - Kabupaten dan Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
1	Kota Bandung	8.45	7.91	8.53	7.84	7.71	7.63	8.01
2	Kota Depok	6.36	6.81	8.06	6.85	7.28	6.63	7.00
3	Karawang	11.87	6.56	4.94	7.96	5.37	4.49	6.87
4	Purwakarta	5.77	6.7	6.83	7.15	5.72	4.75	6.15
5	Kota Bogor	6.14	6.22	6.31	6.04	6.01	6.13	6.14
6	Kota Bekasi	5.84	6.45	6.74	6.04	5.61	5.57	6.04
7	Bekasi	6.18	6.6	6.53	6.23	5.88	4.46	5.98
8	Bandung	5.88	5.82	6.28	5.92	5.91	5.89	5.95
9	Kuningan	4.99	5.62	5.71	6.25	6.32	6.38	5.88
10	Bogor	5.09	5.86	6.01	6.14	6.01	6.09	5.86
11	Kota Tasikmalaya	5.73	5.02	5.8	6.17	6.16	6.29	5.86
12	Kota Sukabumi	6.11	6.18	5.8	5.41	5.43	5.1	5.67
13	Bandung Barat	5.47	5.68	6.04	5.94	5.77	5.01	5.65
14	Kota Cimahi	5.3	5.5	6.24	5.65	5.49	5.43	5.60
15	Kota Cirebon	3.81	5.78	5.92	4.9	5.71	5.8	5.32
16	Kota Banjar	5.28	5.47	5.32	5.45	4.97	5.32	5.30
17	Ciamis	5.07	5.23	5.41	5.34	5.07	5.58	5.28
18	Sukabumi	4.02	4.42	6.38	5.51	5.98	4.91	5.20
19	Cirebon	4.96	5.23	5.46	4.96	5.07	4.87	5.09
20	Majalengka	4.59	4.71	6.06	4.93	4.91	5.33	5.09
21	Cianjur	4.53	4.89	5.6	4.89	5.06	5.46	5.07
22	Sumedang	4.22	4.79	6.56	4.84	4.7	5.23	5.06
23	Garut	5.34	4.95	4.07	4.76	4.81	4.51	4.74
24	Tasikmalaya	4.27	4.25	4.02	4.65	4.78	4.31	4.38
25	Pangandaran	-	4.34	5.18	4.95	4.19	4.98	3.94
26	Subang	4.34	3.27	0.6	4.09	5.02	5.29	3.77
27	Indramayu	4.03	4.06	3.18	2.86	4.93	2.16	3.54
28	Provinsi Jawa Barat	6.2	6.5	6.5	6.33	5.09	5.03	5.94

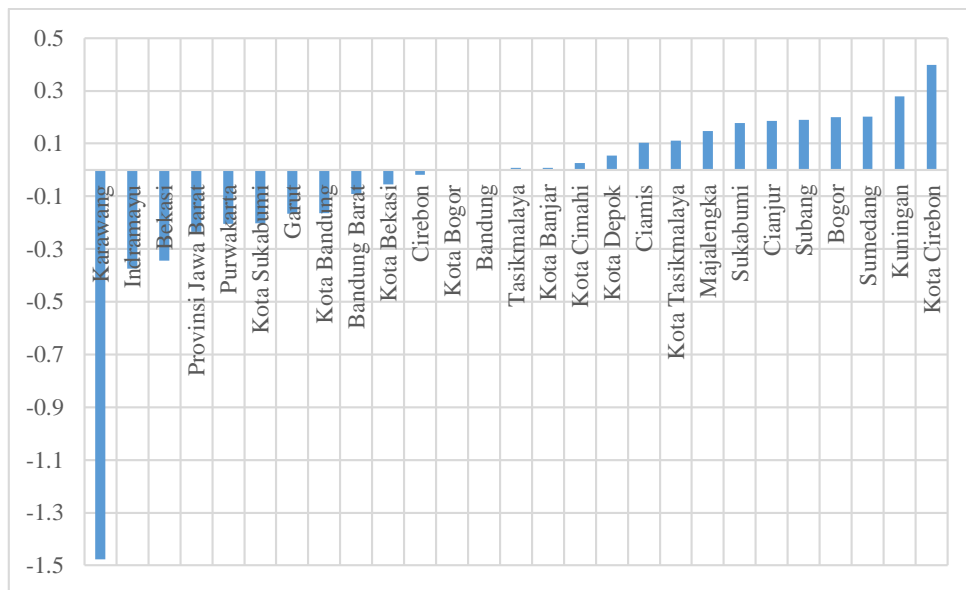
Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Berdasarkan data di atas, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat secara rata-rata tercatat mencapai 5.94 persen dalam kurun waktu 2010-2015. Namun demikian secara trend, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir.

Dari sisi Kabupaten dan Kota, terdapat 8 Kabupaten dan Kota yang mencapai laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan wilayah dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2010-2015 yang mencapai 8.01 persen, disusul oleh Kota Depok (7.00 persen), Kabupaten Karawang (6.87 persen), Kabupaten Purwakarta (6.15 persen), Kota Bogor (6.14 persen), Kota Bekasi (6.04 persen), Kabupaten Bekasi (5.98 persen) dan Kabupaten Bandung (5.95 persen).

Di sisi lain terdapat 19 Kabupaten dan Kota yang memiliki pencapaian laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di bawah provinsi Jawa Barat. Secara spesifik 5 Kabupaten dan Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Indramayu (3.54 persen), Kabupaten Subang (3.77 persen), Kabupaten Tasikmalaya (4.38 persen), Kabupaten Pangandaran (4,73 persen) dan Kabupaten Garut (4,38 persen).

**Gambar 4.1. Rata-Rata Peningkatan/Penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014**



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Gambar di atas menunjukkan rata-rata peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2014. Sebanyak 15 Kabupaten dan Kota menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dengan Kota Cirebon sebagai yang tertinggi. Adapun 11 Kabupaten dan Kota lainnya menunjukkan rata-rata penurunan pertumbuhan ekonomi dengan Kabupaten Karawang sebagai yang tertinggi. Adapun Provinsi Jawa Barat secara rata-rata menunjukkan penurunan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Temuan menarik akan ditemukan apabila gambar diatas disandingkan dengan data rata-rata laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang tahun 2010-2014, secara rata-rata Kota Bandung malah menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,164 persen. Begitupun dengan Kabupaten Indramayu, sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata terendah di Provinsi Jawa Barat,

Kabupaten ini cukup bermasalah juga dari sisi perkembangannya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu tercatat mengalami penurunan sekitar 0,374 persen per tahun sepanjang tahun 2010-2014.

#### **4.1.2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat**

Tingkat kemiskinan merupakan prosentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2016). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Data tingkat kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat secara rata-rata tahun 2010-2014 mencapai 10.1 persen. Secara *trend*, angka tersebut menunjukkan penurunan dari kondisi awal di tahun 2010 yang mencapai 11.27 persen hingga tahun 2014 yang mencapai 9.18 persen.

**Tabel 4–2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat  
2010-2014 (Persen)**

No	Provinsi - Kabupaten dan Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Kota Depok	2.84	2.75	2.46	2.32	2.32	2.54
2	Kota Bandung	4.95	4.78	4.55	4.78	4.65	4.74
3	Bekasi	6.11	5.93	5.25	5.2	4.97	5.49
4	Kota Bekasi	6.3	6.12	5.55	5.33	5.25	5.71
5	Kota Cimahi	7.4	7.15	6.67	5.63	5.47	6.46
6	Kota Banjar	8.47	7.78	7.11	7.11	6.95	7.49
7	Bandung	9.3	8.99	8.32	7.94	7.65	8.44
8	Kota Sukabumi	9.24	8.95	8.41	8.05	7.65	8.46
9	Kota Bogor	9.47	9.16	8.47	8.19	7.74	8.61
10	Bogor	9.97	9.65	8.82	9.54	8.91	9.38
11	Ciamis	10.34	9.98	9.61	8.62	8.38	9.39
12	Purwakarta	10.57	10.22	9.56	9.28	8.8	9.68
13	Sukabumi	10.65	10.28	9.78	9.24	8.81	9.75
14	Kota Cirebon	12	11.56	11.08	10.54	10.03	11.04
15	Karawang	12.21	11.8	11.1	10.69	10.15	11.19
16	Sumedang	12.94	12.48	11.85	11.31	10.78	11.87
17	Tasikmalaya	12.79	12.36	11.75	11.57	11.26	11.95
18	Subang	13.54	13.06	12.47	12.35	11.73	12.63
19	Cianjur	14.32	13.82	13.17	12.02	11.47	12.96
20	Garut	13.94	13.47	12.7	12.79	12.47	13.07
21	Bandung Barat	14.68	14.22	13.33	12.92	12.26	13.48
22	Kuningan	14.68	14.2	13.69	13.34	12.72	13.73
23	Majalengka	15.52	14.98	14.44	14.07	13.42	14.49
24	Cirebon	16.12	15.56	14.94	14.65	14.22	15.1
25	Indramayu	16.58	16.01	15.42	14.99	14.29	15.46
26	Kota Tasikmalaya	20.71	18.92	17.19	17.19	15.95	17.99
27	Pangandaran	-	-	-	-	-	-
28	Provinsi Jawa Barat	11.27	10.57	9.89	9.61	9.18	10.1

Sumber : Badan Pusat Statistik (2015)

Dari sisi Kabupaten dan Kota, Kota Bandung dan Kota Depok merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan terendah. Keduanya memiliki rata-rata prosentase angka kemiskinan di bawah 5 persen dengan Kota Depok sebesar 2.54 persen dan Kota Bandung sebesar 4.74 persen. Selain 2 Kota tersebut, terdapat 11 Kabupaten dan Kota lain yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan yang lebih

rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. 11 Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kabupaten Bekasi (5.49 persen), Kota Bekasi (5.71 persen), Kota Cimahi (6.46 persen), Kota Banjar (7.49 persen), Kabupaten Bandung (8.44 persen), Kota Sukabumi (8.46 persen), Kota Bogor (8.61 persen), Kabupaten Bogor (9.38 persen), Kabupaten Ciamis (9.39 persen), Kabupaten Purwakarta (9.68 persen) dan Kabupaten Sukabumi (9.75 persen).

Adapun 13 Kabupaten dan Kota lainnya memiliki tingkat kemiskinan rata-rata lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan menjadi 5 Kabupaten dan Kota dengan rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada periode 2010-2014. Adapun Kabupaten Pangandaran, BPS Provinsi Jawa Barat secara resmi belum mempublikasikan kondisi eksisting tingkat kemiskinannya, mengingat Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis.

#### **4.1.3. Indeks Gini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat**

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan distribusi pendapatan antar kelompok secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang merata secara sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya angka 1 menunjukkan distribusi pendapatan hanya terjadi pada 1 kelompok pendapatan saja.

Indeks gini Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 mencapai 0.41 yang angka tersebut termasuk salah satu yang tertinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Adapun secara rata-rata, indeks gini Provinsi Jawa Barat menunjukkan trend peningkatan yang semula hanya mencapai 0.36 di tahun 2010, namun pada tahun 2015 mencapai 0.41.

**Tabel 4–3. Indeks Gini Provinsi Jawa Barat  
Berdasarkan Kabupaten dan Kota 2010-2015**

No	Provinsi - Kabupaten dan Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indramayu	0.24	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29
2	Cianjur	0.26	0.29	0.33	0.29	0.28	0.28
3	Subang	0.25	0.28	0.33	0.33	0.31	0.33
4	Ciamis	0.25	0.31	0.31	0.33	0.31	0.33
5	Tasikmalaya	0.25	0.37	0.33	0.32	0.29	0.3
6	Cirebon	0.3	0.27	0.36	0.32	0.28	0.33
7	Garut	0.28	0.3	0.34	0.31	0.33	0.31
8	Sukabumi	0.25	0.3	0.35	0.3	0.32	0.36
9	Karawang	0.28	0.33	0.34	0.32	0.3	0.34
10	Bandung Barat	0.29	0.29	0.37	0.31	0.33	0.34
11	Kuningan	0.23	0.33	0.36	0.33	0.37	0.34
12	Majalengka	0.26	0.31	0.39	0.32	0.34	0.35
13	Sumedang	0.27	0.33	0.37	0.34	0.33	0.35
14	Bekasi	0.29	0.33	0.36	0.33	0.33	0.35
15	Kota Bekasi	0.27	0.37	0.37	0.35	0.33	0.41
16	Bandung	0.29	0.36	0.36	0.34	0.37	0.4
17	Purwakarta	0.3	0.34	0.39	0.39	0.37	0.35
18	Kota Banjar	0.32	0.37	0.39	0.34	0.32	0.42
19	Kota Cimahi	0.27	0.34	0.37	0.4	0.39	0.4
20	Kota Sukabumi	0.34	0.34	0.4	0.34	0.36	0.43
21	Kota Depok	0.31	0.36	0.4	0.39	0.37	0.4
22	Kota Cirebon	0.35	0.38	0.41	0.38	0.4	0.41
23	Kota Tasikmalaya	0.33	0.37	0.4	0.39	0.37	0.49
24	Kota Bogor	0.34	0.39	0.45	0.41	0.36	0.47
25	Bogor	0.41	0.41	0.42	0.38	0.39	0.42
26	Kota Bandung	0.36	0.41	0.42	0.42	0.48	0.44
27	Pangandaran	-	-	-	-	-	-
28	Provinsi Jawa Barat	0.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)



Berdasarkan data indeks gini di atas, temuan menarik ada pada Kota Bandung. Dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dan tingkat kemiskinan yang merupakan 2 terendah, Kota Bandung memiliki indeks gini rata-rata tertinggi di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0.42 pada kurun waktu 2010-2015. Bersama Kabupaten Bogor (0.41) dan Kota Bogor (0.40), ketiganya merupakan 3 Kabupaten dan Kota yang memiliki capaian indeks gini tertinggi di Provinsi Jawa Barat diatas capaian indeks gini Provinsi Jawa Barat itu sendiri.

Di sisi lain, Kabupaten Indramayu yang merupakan Kabupaten dengan capaian pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terburuk di Provinsi Jawa Barat memiliki indeks gini terendah pada kurun waktu 2010-2015. Bersama Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang, ketiganya merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata indeks gini terendah di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2010-2015.

#### **4.1.4. Belanja Sosial**

Pada dasarnya belanja sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Namun pengertian belanja sosial pada penelitian ini merupakan penjumlahan bantuan sosial, bantuan keuangan dan hibah yang dikeluarkan dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 4–4. Prosentase Belanja Sosial Terhadap PAD Kabupaten Kota  
di Provinsi Jawa Barat 2010-2014**

Provinsi / Kabupaten dan Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Kab. Ciamis	555.59%	229.73%	156.45%	221.92%	118.34%	256.41%
Kab. Tasikmalaya	232.37%	244.91%	200.19%	250.77%	226.96%	231.04%
Kab. Subang	228.68%	176.71%	102.72%	155.44%	108.25%	154.36%
Kab. Bandung Barat	200.55%	182.43%	142.30%	144.78%	89.45%	151.90%
Kab. Garut	239.82%	144.86%	68.29%	76.44%	32.60%	112.40%
Kab. Cianjur	93.19%	115.71%	133.39%	122.07%	93.84%	111.64%
Kab. Sukabumi	210.37%	156.98%	85.07%	57.87%	46.52%	111.36%
Kab. Indramayu	276.03%	97.23%	53.49%	60.57%	40.93%	105.65%
Kab. Karawang	187.78%	132.66%	41.85%	37.72%	35.77%	87.16%
Kota Banjar	146.80%	96.50%	47.49%	76.51%	63.41%	86.14%
Kab. Bandung	160.78%	76.22%	62.87%	48.96%	39.33%	77.63%
Kab. Majalengka	138.03%	92.78%	51.78%	56.54%	35.12%	74.85%
Kab. Kuningan	103.45%	92.68%	56.47%	67.22%	41.90%	72.34%
Kab. Cirebon	105.82%	79.33%	67.89%	66.32%	35.37%	70.95%
Kab. Sumedang	136.74%	45.91%	48.96%	69.76%	33.52%	66.98%
Kab. Bogor	106.79%	69.79%	39.63%	47.24%	32.67%	59.22%
Kota Tasikmalaya	78.90%	51.25%	58.03%	31.44%	29.79%	49.88%
Kota Cirebon	112.10%	62.59%	30.96%	12.45%	18.43%	47.31%
Kota Depok	143.18%	65.00%	12.73%	6.28%	6.16%	46.67%
Kab. Purwakarta	42.12%	49.93%	51.07%	57.75%	18.87%	43.95%
Kota Sukabumi	85.93%	49.68%	31.20%	27.38%	13.50%	41.54%
Kota Bandung	49.52%	54.74%	57.87%	28.08%	16.81%	41.40%
Kab. Bekasi	91.05%	48.71%	21.29%	15.94%	11.41%	37.68%
Kota Bogor	74.57%	47.80%	10.12%	29.50%	14.72%	35.34%
Kota Cimahi	29.17%	37.70%	45.10%	16.94%	12.04%	28.19%
Kota Bekasi	28.52%	31.80%	30.87%	10.38%	8.96%	22.11%
Prov. Jawa Barat	49.70%	49.85%	96.14%	86.22%	81.74%	72.73%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016)

Hasil pengolahan data prosentase belanja sosial terhadap Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa masih terdapat Kabupaten dan Kota yang pengeluaran belanja sosialnya lebih tinggi dari pendapatan asli daerahnya. Hal ini berarti di

beberapa Kabupaten dan Kota pengeluaran belanja sosial tidak bisa dibiayai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, pengolahan data juga menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat 8 Kabupaten dan Kota yang memiliki pengeluaran belanja sosial lebih tinggi dari pendapatan asli daerah. 8 Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Subang, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kab. Indramayu. Sedangkan Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok merupakan Kabupaten dan Kota yang memiliki rata-rata prosentase belanja sosial terhadap PAD terendah di Provinsi Jawa Barat.

Dari sisi prosentase belanja sosial terhadap APBD dapat diketahui seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi kurang dari 100 persen, artinya jumlah pengeluaran belanja sosial tidak ada yang melebihi nilai APBD di masing-masing Kabupaten dan Kota.

Data menunjukkan bahwa Kab. Ciamis, Kab. Bandung Barat, Kab. Bogor, Kab. Subang dan Kab. Tasikmalaya merupakan Kabupaten dan Kota yang memiliki Prosentase rata-rata belanja sosial terhadap APBD tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2010-2014. Adapun Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kota Bekasi, Kab. Majalengka dan Kota Cimahi merupakan Kabupaten dan Kota dengan prosentase rata-rata belanja sosial terhadap APBD terendah di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 4–5. Prosentase Belanja Sosial Terhadap APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2010-2014**

Provinsi / Kabupaten dan Kota	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
Kab. Ciamis	22.39%	9.32%	7.09%	11.54%	10.49%	12.17%
Kab. Bandung Barat	8.57%	11.66%	9.47%	17.11%	13.53%	12.07%
Kab. Bogor	15.72%	11.34%	9.35%	10.22%	9.05%	11.14%
Kab. Subang	14.67%	11.23%	6.95%	12.05%	9.62%	10.90%
Kab. Tasikmalaya	15.12%	8.46%	7.01%	11.05%	11.74%	10.68%
Kab. Cianjur	7.71%	9.28%	12.57%	11.57%	10.34%	10.29%
Kab. Karawang	17.94%	13.51%	4.84%	6.52%	8.56%	10.27%
Kota Bandung	8.29%	11.67%	12.03%	8.28%	5.64%	9.18%
Kab. Sukabumi	11.69%	11.20%	7.42%	6.37%	7.22%	8.78%
Kota Banjar	13.18%	9.97%	4.73%	7.42%	7.67%	8.59%
Kab. Indramayu	20.70%	6.38%	3.43%	4.19%	4.25%	7.79%
Kab. Bandung	12.69%	6.99%	6.54%	6.43%	5.56%	7.64%
Kab. Cirebon	10.19%	7.92%	7.12%	6.95%	4.97%	7.43%
Kab. Garut	16.64%	8.60%	4.32%	4.64%	2.90%	7.42%
Kab. Sumedang	15.34%	5.42%	4.91%	6.13%	3.73%	7.11%
Kota Cirebon	13.42%	9.36%	4.98%	2.32%	3.92%	6.80%
Kab. Bekasi	12.09%	8.74%	4.33%	4.72%	3.57%	6.69%
Kota Tasikmalaya	9.04%	6.44%	7.77%	4.02%	4.82%	6.42%
Kota Sukabumi	11.43%	7.24%	5.43%	4.67%	2.94%	6.34%
Kota Depok	13.39%	10.27%	2.88%	1.59%	1.73%	5.97%
Kota Bogor	9.13%	8.39%	1.67%	6.03%	3.58%	5.76%
Kab. Purwakarta	2.91%	4.78%	6.86%	8.19%	4.64%	5.47%
Kab. Kuningan	7.27%	6.44%	3.93%	4.52%	4.10%	5.25%
Kota Bekasi	5.07%	7.74%	7.20%	2.99%	2.49%	5.10%
Kab. Majalengka	9.36%	6.08%	3.08%	4.01%	2.66%	5.04%
Kota Cimahi	3.74%	5.73%	5.48%	2.56%	1.87%	3.88%
Prov. Jawa Barat	29.23%	31.85%	49.74%	48.64%	50.28%	41.95%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016)

## **4.2. Analisis Wilayah Mengenai Keterkaitan Antar Variabel Penelitian**

Pada bagian ini akan ditunjukkan posisi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat di lihat berdasarkan capaian angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks gini dan belanja sosial.

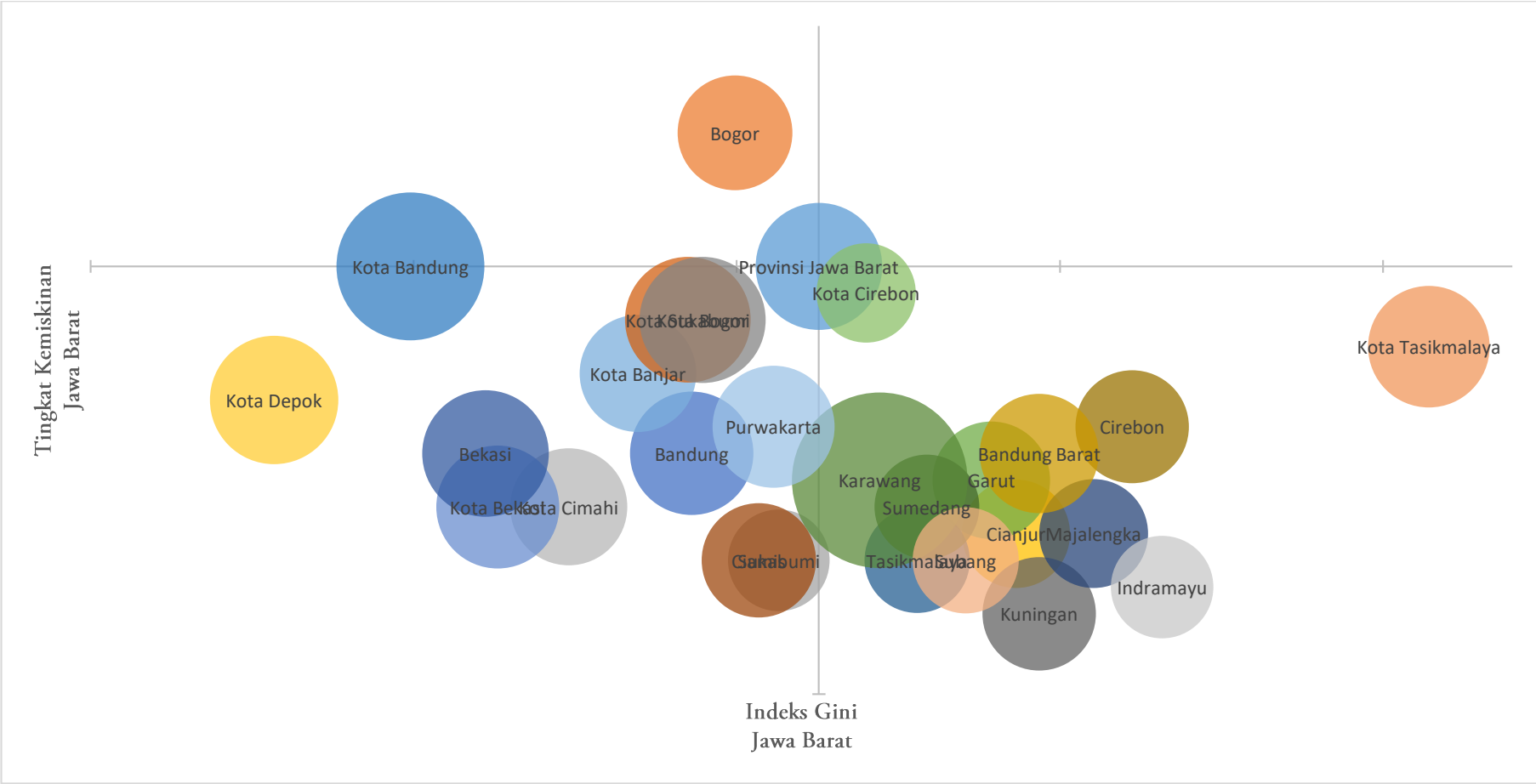
### **4.2.1. Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan suatu indikator yang menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat dari suatu wilayah. Namun demikian dalam beberapa kesempatan ditemui fenomena dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih disertai dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang tinggi yang sering dinyatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Dengan menggunakan analisis *bubble chart*, maka dapat diketahui wilayah yang terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemiskinan rendah, wilayah dengan kategori pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemiskinan tinggi, wilayah dengan pertumbuhan tinggi dan kemiskinan rendah serta wilayah dengan pertumbuhan rendah dan kemiskinan rendah. Indikator tinggi rendahnya suatu capaian mengacu pada capaian pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat. Suatu Kabupaten dan Kota dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat capaian pertumbuhan ekonomi berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Hal tersebut berlaku juga untuk angka kemiskinan.

Gambar 4.2. akan memperlihatkan perkembangan capaian indikator tingkat kemiskinan (Y), indeks gini (X) dan pertumbuhan ekonomi (*buble size*) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2010-2014. Pada tahun 2010,

tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat berada pada angka 11,27 persen. Adapun dari sisi Kabupaten dan Kota, tingkat kemiskinan berada pada rentang 2,84 – 20,71 persen dengan Kota Depok sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah dan Kota Tasikmalaya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Dari aspek ketimpangan pendapatan, indeks gini Provinsi Jawa Barat berada pada angka 0,36, sedangkan secara Kabupaten dan Kota berada pada rentang 0,23 – 0,41 dengan Kabupaten Kuningan sebagai yang terendah dan Kabupaten Bogor sebagai yang tertinggi. Adapun dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2010 ekonomi Provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 6,2 dengan Kabupaten Karawang sebagai yang tertinggi dengan 1,87 persen dan Kota Cirebon merupakan yang terendah dengan 3,81 persen.

**Gambar 4.2. Kemiskinan, Gini Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2010**



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari 4 kelompok yang dapat dijelaskan pada *bubble chart*, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kategori pertama adalah wilayah dengan capaian indeks gini dan tingkat kemiskinan yang rendah yang ditunjukkan oleh 12 Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sukabumi. Kategori kedua adalah terdapat 13 wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dengan indeks gini yang rendah yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya. Kategori terakhir merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi juga disertai dengan indeks gini yang tinggi yang hanya di tempat oleh 1 wilayah saja yaitu Kabupaten Bogor. Menilik dari capaian indikator tingkat kemiskinan dan indeks gini, terdapat 12 daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan indeks gini di bawah capaian Provinsi Jawa Barat.

Di akhir tahun penelitian pada tahun 2014, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat berada pada angka 9,18 persen dari yang sebelumnya mencapai 11,27 persen pada tahun 2010. Adapun dari sisi Kabupaten dan Kota, tingkat kemiskinan berada pada rentang 2,32 – 15,95 persen dengan Kota Depok dan Kota Tasikmalaya masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah dan tertinggi seperti yang terjadi pada tahun 2010. Rentang tersebut menunjukkan sebuah perbaikan dimana pada tahun



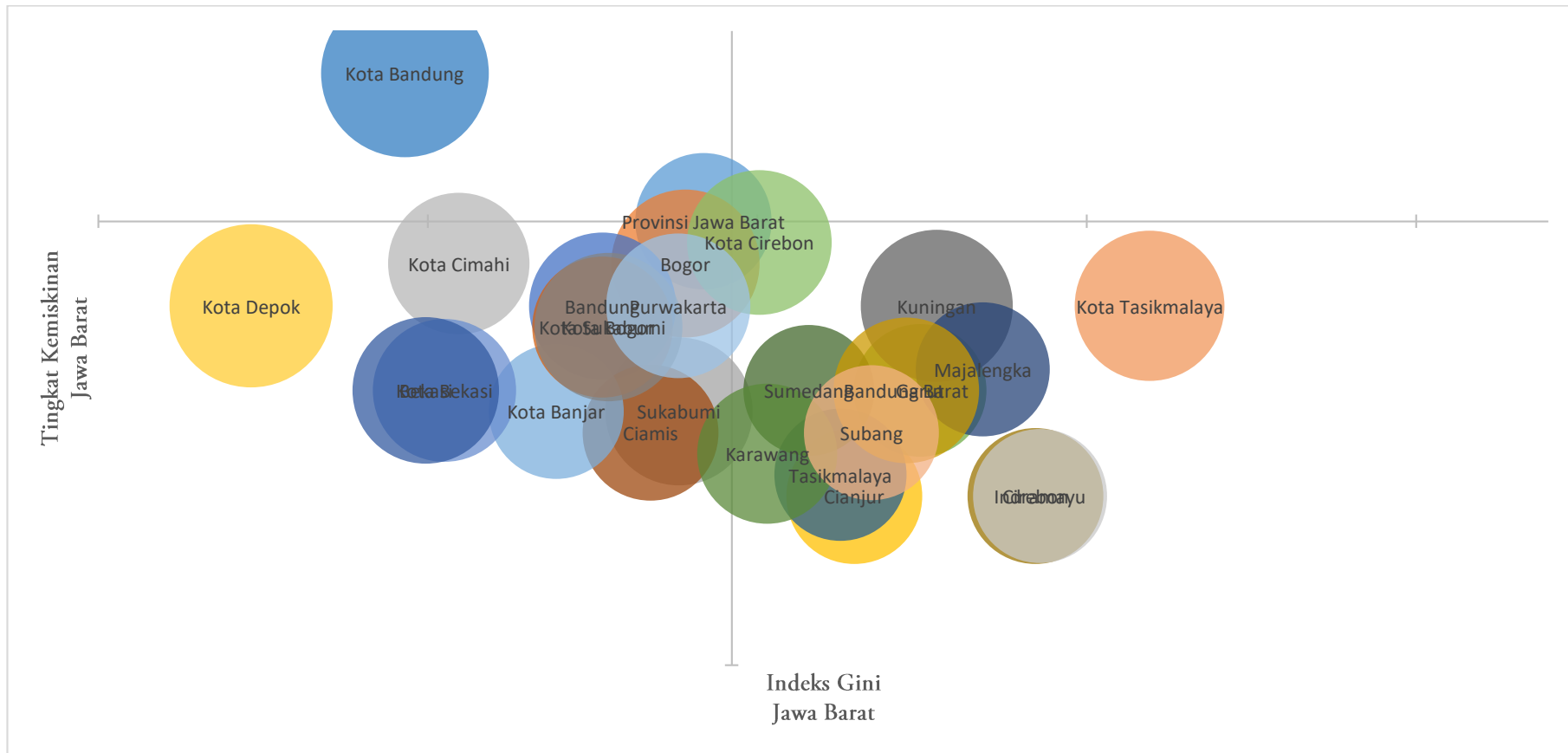
2010 selisih tingkat kemiskinan antara daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah mencapai 17,87 persen menjadi 13,63 persen pada tahun 2014.

Dari aspek ketimpangan pendapatan, indeks gini Provinsi Jawa Barat berada pada angka 0,41, meningkat 0,05 poin dari tahun 2010. Adapun rentang indeks gini Kabupaten dan Kota berada pada angka 0,28 – 0,48 Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cianjur sebagai daerah dengan indeks gini terendah serta Kota Bandung sebagai yang tertinggi. Rentang ini menunjukkan sebuah capaian yang buruk dimana pada tahun 2010 hanya menunjukkan selisih 0,18 poin sedangkan pada tahun 2014 selisihnya mencapai 0,20 dengan Kota Bandung yang notabene merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan terbaik di Jawa Barat menjadi daerah dengan capaian indeks gini terburuk dengan 0,48 poin.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2014 ekonomi Provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,09 persen, jauh menurun dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 6,20 persen. Dari sisi Kabupaten dan Kota, rentang pertumbuhan ekonomi ada pada angka 4,7 – 7,71 persen dengan Kota Bandung sebagai yang tertinggi dan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah.

Pada *Bubble chart* kemiskinan, gini rasio dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2014 masih menunjukkan tidak ada satupun Kabupaten dan Kota yang masuk pada kategori daerah dengan indeks gini dan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ini tentunya dapat menjelaskan bahwa indeks gini dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, tergolong cukup tinggi.

**Gambar 4.3. Kemiskinan, Gini Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2014**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada dasarnya, dari 4 kelompok yang dapat ditunjukkan pada *bubble chart*, secara kelompok hanya terdapat 1 perbedaan yaitu Kota Bandung yang pada tahun 2010 berada pada kelompok daerah dengan indeks gini dan tingkat kemiskinan di bawah Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan pada tahun 2014 menjadi satu-satunya daerah dengan indeks gini di atas capaian Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemiskinan yang rendah namun menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Kondisi ini memberikan suatu indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum bisa menyelesaikan permasalahan ketimpangan pendapatan yang ada di Kota Bandung. Adapun Kota Bogor menunjukkan perbaikan dengan masuk ke kelompok dengan tingkat tingkat kemiskinan dan indeks gini di bawah capaian Provinsi Jawa Barat.

Secara umum sepanjang tahun 2010-2014 terdapat beberapa perubahan baik itu yang menunjukkan sebuah kemajuan maupun kemunduran. Dari aspek tingkat kemiskinan, seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan angka kemiskinan dengan Kota Tasikmalaya sebagai daerah dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 4,7 persen.

Dari aspek ketimpangan pendapatan, tercatat hanya 2 Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cirebon yang mengalami penurunan indeks gini, sedangkan 24 Kabupaten dan Kota lainnya mengalami capaian indeks gini yang lebih besar. Kabupaten Kuningan merupakan daerah dengan peningkatan indeks gini tertinggi pada periode 2010 – 2014 dengan 0,14.

Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan 1,96 persen diantara 17 Kabupaten dan Kota yang menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014. Sedangkan Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan 6,51 persen diantara 9 Kabupaten dan Kota yang menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Di antara 26 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, hanya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cirebon yang menunjukkan *progress* pada variabel tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan oleh indeks gini. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan sebesar 0,92 persen pada periode 2010-2014 disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan indeks gini masing-masing sebesar 1,02 persen dan 0,02 poin. Adapun Kabupaten Cirebon, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 0,11 persen disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,90 persen dan indeks gini sebesar 0,02 poin sama dengan penurunan indeks gini Kabupaten Bogor di periode yang sama.

**Tabel 4–6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014**

Kabupaten dan Kota	Kemiskinan (%)			Indeks Gini			LPE (%)		
	2010	2014	Selisih	2010	2014	Selisih	2010	2014	Selisih
Bogor	9.97	8.91	-1.06	0.41	0.39	-0.02	5.09	6.01	0.92
Sukabumi	10.65	8.81	-1.84	0.25	0.32	0.07	4.02	5.98	1.96
Cianjur	14.32	11.47	-2.85	0.26	0.28	0.02	4.53	5.06	0.53
Bandung	9.3	7.65	-1.65	0.29	0.37	0.08	5.88	5.91	0.03
Garut	13.94	12.47	-1.47	0.28	0.33	0.05	5.34	4.81	-0.53
Tasikmalaya	12.79	11.26	-1.53	0.25	0.29	0.04	4.27	4.78	0.52
Ciamis	10.34	8.38	-1.96	0.25	0.31	0.06	5.07	5.07	0
Kuningan	14.68	12.72	-1.96	0.23	0.37	0.14	4.99	6.32	1.34
Cirebon	16.12	14.22	-1.9	0.3	0.28	-0.02	4.96	5.07	0.11
Majalengka	15.52	13.42	-2.1	0.26	0.34	0.08	4.59	4.91	0.32
Sumedang	12.94	10.78	-2.16	0.27	0.33	0.06	4.22	4.7	0.48
Indramayu	16.58	14.29	-2.29	0.24	0.28	0.04	4.03	4.93	0.89
Subang	13.54	11.73	-1.81	0.25	0.31	0.06	4.34	5.02	0.68
Purwakarta	10.57	8.8	-1.77	0.3	0.37	0.07	5.77	5.72	-0.05
Karawang	12.21	10.15	-2.06	0.28	0.3	0.02	11.87	5.37	-6.51
Bekasi	6.11	4.97	-1.14	0.29	0.33	0.04	6.18	5.88	-0.3
Bandung Barat	14.68	12.26	-2.42	0.29	0.33	0.04	5.47	5.77	0.3
Kota Bogor	9.47	7.74	-1.73	0.34	0.36	0.02	6.14	6.01	-0.13
Kota Sukabumi	9.24	7.65	-1.59	0.34	0.36	0.02	6.11	5.43	-0.68
Kota Bandung	4.95	4.65	-0.3	0.36	0.48	0.12	8.45	7.71	-0.73
Kota Cirebon	12	10.03	-1.97	0.35	0.4	0.05	3.81	5.71	1.9
Kota Bekasi	6.3	5.25	-1.05	0.27	0.33	0.06	5.84	5.61	-0.22
Kota Depok	2.84	2.32	-0.52	0.31	0.37	0.06	6.36	7.28	0.92
Kota Cimahi	7.4	5.47	-1.93	0.27	0.39	0.12	5.3	5.49	0.19
Kota Tasikmalaya	20.71	15.95	-4.76	0.33	0.37	0.04	5.73	6.16	0.43
Kota Banjar	8.47	6.95	-1.52	0.32	0.32	0	5.28	4.97	-0.31
Jawa Barat	11.27	9.18	-2.09	0.36	0.41	0.05	6.2	5.09	-1.11

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016)

#### 4.2.2. Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Belanja Sosial

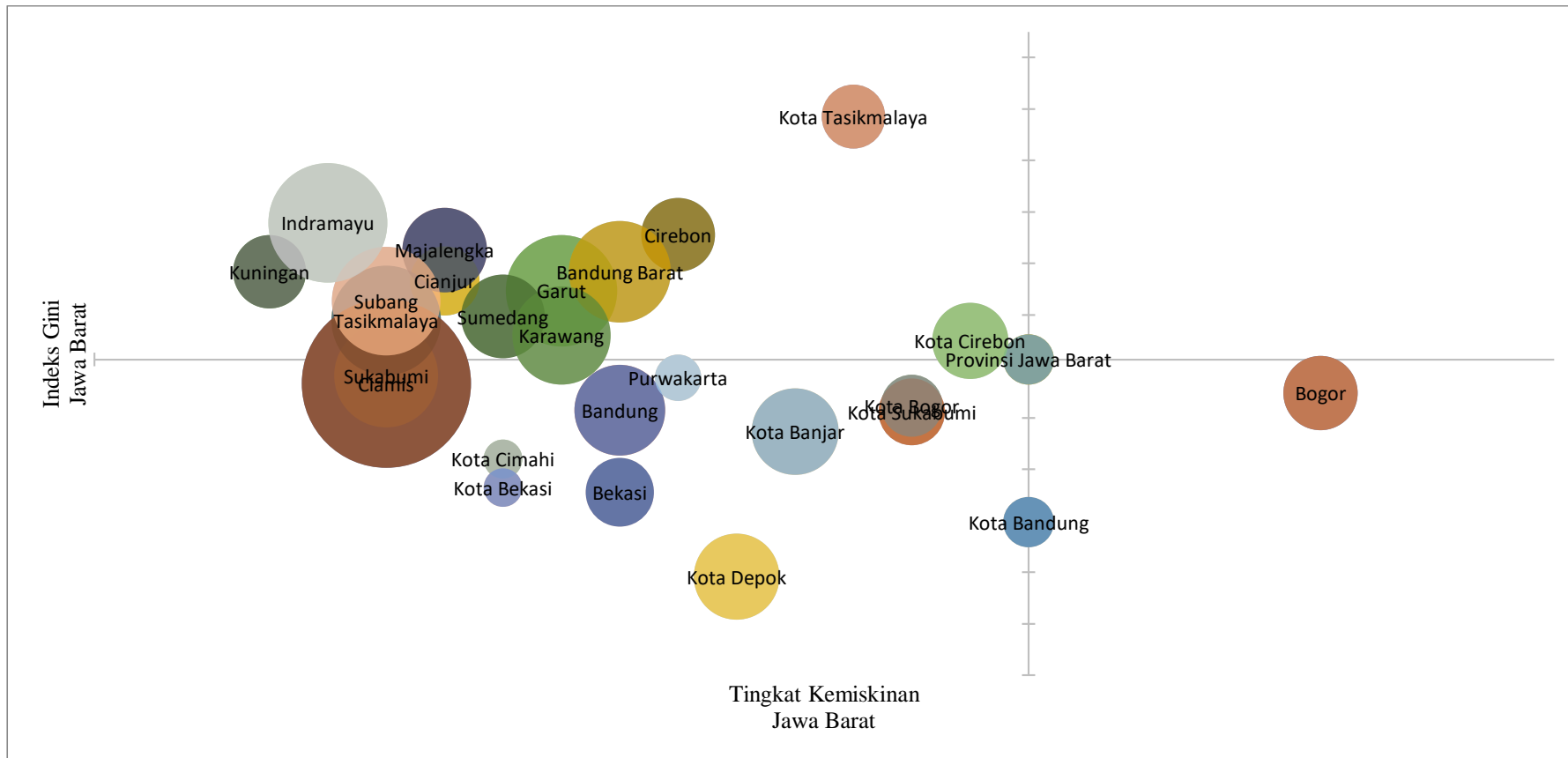
Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan topik yang masih menjadi permasalahan utama di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten dan Kota yang

berada di dalamnya. Memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat juga memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dengan ketimpangan pendapatan yang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menilik dari fenomena tersebut, berikut ditampilkan posisi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan rasio belanja sosial terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat disandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat pada variabel-variabel tersebut.

Pada awal tahun penelitian di 2010, Kabupaten Bogor memiliki capaian indeks gini lebih besar dari Provinsi Jawa Barat sedangkan Kota Bandung merupakan wilayah yang memiliki capaian indeks gini yang sama dengan capaian indeks gini Provinsi Jawa Barat. Gambar di atas menunjukkan bahwa keduanya termasuk ke dalam kategori wilayah dengan indeks gini tinggi dengan tingkat kemiskinan rendah. Selain keduanya, Kabupaten dan Kota lain termasuk ke dalam kategori wilayah dengan indeks gini rendah dengan tingkat kemiskinan rendah atau tinggi.

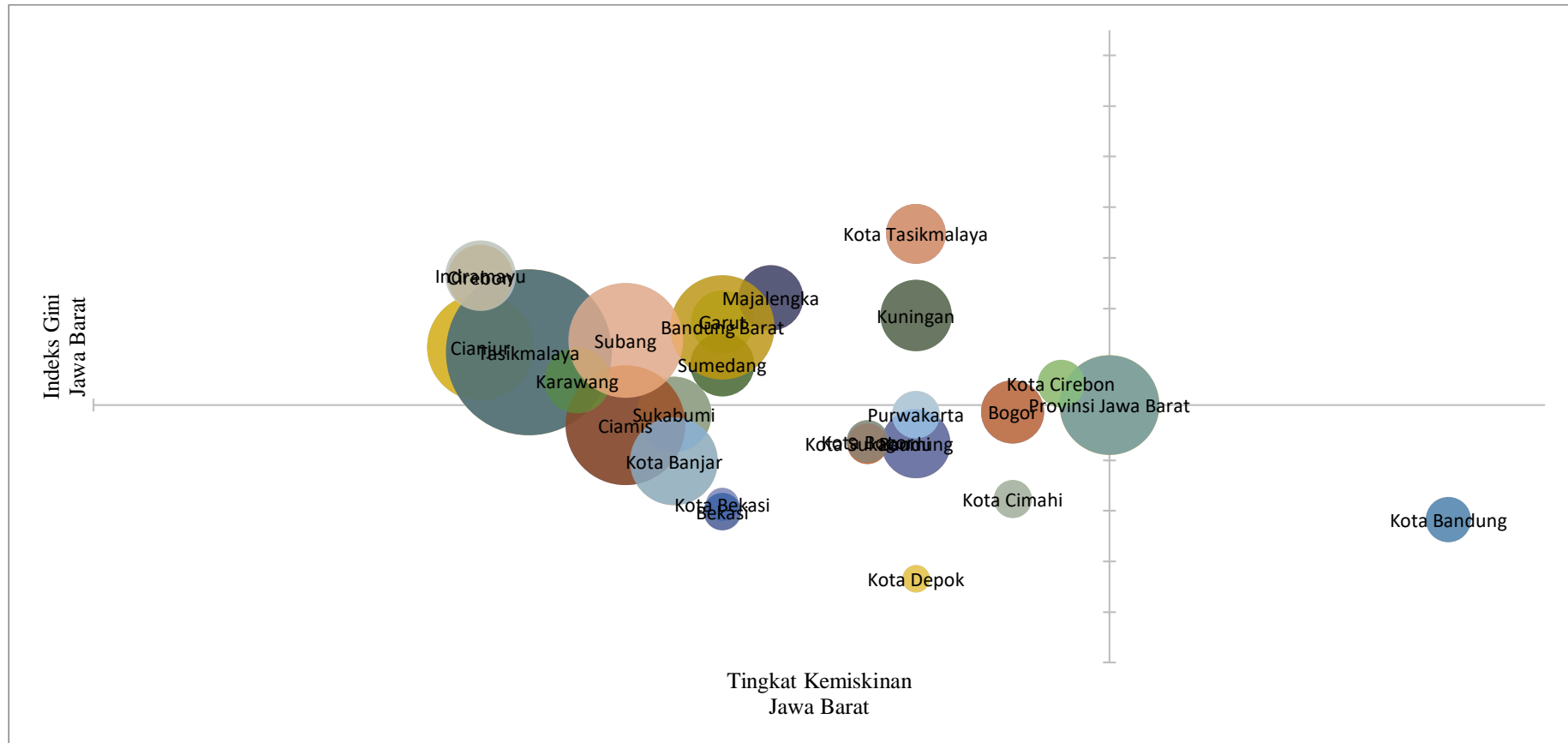
Selanjutnya, tahun 2014 yang merupakan akhir tahun penelitian, Kota Bandung merupakan satu-satunya wilayah yang memiliki indeks gini tertinggi di Provinsi Jawa Barat jauh di atas Kabupaten dan Kota lain dan capaian indeks gini Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Dengan capaian indeks gini sebesar 0.48, nilai ini jauh di atas indeks gini Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0.41. Adapun Kabupaten dan Kota lainnya memiliki indeks gini di bawah 0.41, artinya Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat selain Kota Bandung memiliki capaian indeks gini lebih kecil dibandingkan dengan capaian indeks gini Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 4.4. Indeks Gini, Kemiskinan dan Rasio Belanja Sosial Terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2010**



Sumber : Hasil Pengolahan Data

**Gambar 4.5. Indeks Gini, Kemiskinan dan Rasio Belanja Sosial Terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2014**



Sumber : Hasil Pengolahan Data



Dari sisi rasio belanja sosial terhadap pendapatan asli daerah, terlihat tidak ada pola yang tetap di masing-masing tahun. Besarnya rasio belanja sosial terhadap pendapatan asli daerah tidak menentukan posisi Kabupaten dan Kota berdasarkan tinggi rendahnya indeks gini dan tingkat kemiskinan.

**Tabel 4–7. Perkembangan Kemiskinan, Indeks Gini dan Rasio Belanja Sosial Terhadap PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014**

Kabupaten dan Kota	Kemiskinan (%)			Indeks Gini			Rasio Belanja Sosial /PAD		
	2010	2014	Selisih	2010	2014	Selisih	2010	2014	Selisih
Bogor	9.97	8.91	-1.06	0.41	0.39	-0.02	1.07	0.33	-0.74
Sukabumi	10.65	8.81	-1.84	0.25	0.32	0.07	2.1	0.47	-1.64
Cianjur	14.32	11.47	-2.85	0.26	0.28	0.02	0.93	0.94	0.01
Bandung	9.3	7.65	-1.65	0.29	0.37	0.08	1.61	0.39	-1.21
Garut	13.94	12.47	-1.47	0.28	0.33	0.05	2.4	0.33	-2.07
Tasikmalaya	12.79	11.26	-1.53	0.25	0.29	0.04	2.32	2.27	-0.05
Ciamis	10.34	8.38	-1.96	0.25	0.31	0.06	5.56	1.18	-4.37
Kuningan	14.68	12.72	-1.96	0.23	0.37	0.14	1.03	0.42	-0.62
Cirebon	16.12	14.22	-1.9	0.3	0.28	-0.02	1.06	0.35	-0.7
Majalengka	15.52	13.42	-2.1	0.26	0.34	0.08	1.38	0.35	-1.03
Sumedang	12.94	10.78	-2.16	0.27	0.33	0.06	1.37	0.34	-1.03
Indramayu	16.58	14.29	-2.29	0.24	0.28	0.04	2.76	0.41	-2.35
Subang	13.54	11.73	-1.81	0.25	0.31	0.06	2.29	1.08	-1.2
Purwakarta	10.57	8.8	-1.77	0.3	0.37	0.07	0.42	0.19	-0.23
Karawang	12.21	10.15	-2.06	0.28	0.3	0.02	1.88	0.36	-1.52
Bekasi	6.11	4.97	-1.14	0.29	0.33	0.04	0.91	0.11	-0.8
Bandung Barat	14.68	12.26	-2.42	0.29	0.33	0.04	2.01	0.89	-1.11
Kota Bogor	9.47	7.74	-1.73	0.34	0.36	0.02	0.75	0.15	-0.6
Kota Sukabumi	9.24	7.65	-1.59	0.34	0.36	0.02	0.86	0.14	-0.72
Kota Bandung	4.95	4.65	-0.3	0.36	0.48	0.12	0.5	0.17	-0.33
Kota Cirebon	12	10.03	-1.97	0.35	0.4	0.05	1.12	0.18	-0.94
Kota Bekasi	6.3	5.25	-1.05	0.27	0.33	0.06	0.29	0.09	-0.2
Kota Depok	2.84	2.32	-0.52	0.31	0.37	0.06	1.43	0.06	-1.37
Kota Cimahi	7.4	5.47	-1.93	0.27	0.39	0.12	0.29	0.12	-0.17
Kota Tasikmalaya	20.71	15.95	-4.76	0.33	0.37	0.04	0.79	0.3	-0.49
Kota Banjar	8.47	6.95	-1.52	0.32	0.32	0	1.47	0.63	-0.83
Jawa Barat	11.27	9.18	-2.09	0.36	0.41	0.05	0.5	0.82	0.32

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas ini menunjukkan perkembangan indikator tingkat kemiskinan, indeks gini dan rasio belanja sosial terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten dan Kota tahun 2010-2014. Analisis dari aspek kemiskinan dan indeks gini merupakan analisis yang sama dengan analisis yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6. Dari sisi belanja sosial, secara rasio hanya Kabupaten Cianjur yang menunjukkan peningkatan rasio belanja sosial terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan 25 Kabupaten dan Kota lainnya menunjukkan penurunan rasio belanja sosial terhadap pendapatan asli daerah dengan Kabupaten Ciamis sebagai daerah dengan penurunan rasio tertinggi sebesar 4,37 persen selama 2010-2014.

Berdasarkan penggambaran deskriptif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, indeks gini dan dana belanja sosial diatas, tidak ditemukan pola terstruktur terkait hubungan antara dana belanja sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini dimungkinkan oleh lemahnya perencanaan pembangunan terutama terkait dengan proses alokasi yang belum efisien. Oleh sebab itu, analisis berikutnya akan dikaitkan dengan perhitungan efisiensi dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis*.

### **4.3. Hasil Pengolahan *Data Envelopment Analysis***

#### **4.3.1. Skor Efisiensi *Variable Return to Scale Output-Oriented***

Pada DEA *output oriented*, nilai efisiensi berkisar dari satu (100%) sampai dengan tak hingga. DMU yang efisien merupakan DMU yang memiliki nilai efisiensi 100%. Semakin nilai efisiensinya lebih dari 100%, maka semakin tidak efisien DMU tersebut (Zhu, 2008).

Penelitian ini menggunakan 26 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang dianalisis pada tahun 2010-2014. Pengolahan data dilakukan dengan menggabungkan seluruh Kabupaten Kota dalam 5 tahun sehingga terbentuk 130 DMU, tidak dengan analisis terpisah untuk setiap tahun yang menggunakan 26 DMU, sehingga output yang dihasilkan memungkinkan untuk tidak terdapat DMU yang efisien pada tahun tertentu.

Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan *software MAXDEA 7* didapat hasil efisiensi bahwa Kota Depok dan Kota Cimahi merupakan daerah yang efisien sepanjang periode penelitian. Secara umum, hasil pengolahan data menunjukkan 29 DMU (30 persen) yang terangkum ke dalam 16 Kabupaten Kota mencapai kondisi yang efisien di tahun-tahun tertentu dalam penggunaan belanja sosial terhadap optimalisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini. 16 DMU tersebut adalah Kota Depok (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Kota Cimahi ((2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Kota Sukabumi (2010, 2011, 2013, 2014), Kab. Bekasi (2012, 2014), Kota Bekasi (2010, 2013, 2014), Kota Bandung (2010, 2012), Kab. Majalengka (2010, 2012, 2013, 2014), Kab. Kuningan (2010, 2012, 2013, 2014), Kab. Indramayu (2012), Kota Banjar (2012), Kab. Ciamis (2010, 2012), Kab. Purwakarta (2010), Kab. Sukabumi (2010), Kab. Karawang (2010, 2013), Kota Bogor (2012) dan Kota Cirebon (2013).

**Tabel 4–8. Hasil Analisis Efisiensi**  
*Data Envelopment Analysis VRS Output-Oriented*

No	DMU	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
1	Kota Depok	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	Kota Cimahi	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	Kota Sukabumi	1.0000	1.0000	1.0383	1.0000	1.0000	1.0077
4	Bekasi	1.0075	1.0212	1.0000	1.0117	1.0000	1.0081
5	Kota Bekasi	1.0000	1.0314	1.0181	1.0000	1.0000	1.0099
6	Kota Bandung	1.0000	1.0163	1.0000	1.0200	1.0207	1.0114
7	Majalengka	1.0000	1.0665	1.0000	1.0000	1.0000	1.0133
8	Kuningan	1.0000	1.0670	1.0000	1.0000	1.0000	1.0134
9	Indramayu	1.0130	1.0346	1.0000	1.0230	1.0039	1.0149
10	Kota Banjar	1.0258	1.0277	1.0000	1.0242	1.0027	1.0161
11	Ciamis	1.0000	1.0345	1.0000	1.0310	1.0215	1.0174
12	Purwakarta	1.0000	1.0065	1.0350	1.0147	1.0405	1.0194
13	Sukabumi	1.0000	1.0254	1.0267	1.0243	1.0288	1.0211
14	Karawang	1.0000	1.0617	1.0545	1.0000	1.0411	1.0315
15	Kota Bogor	1.0422	1.0512	1.0000	1.0601	1.0230	1.0353
16	Bandung	1.0257	1.0491	1.0378	1.0318	1.0379	1.0365
17	Sumedang	1.0270	1.0656	1.0105	1.0522	1.0295	1.0369
18	Cianjur	1.0218	1.0475	1.0652	1.0374	1.0173	1.0379
19	Garut	1.0388	1.0547	1.0664	1.0136	1.0212	1.0389
20	Subang	1.0124	1.0344	1.0661	1.0574	1.0482	1.0437
21	Tasikmalaya	1.0095	1.0857	1.0474	1.0517	1.0341	1.0457
22	Kota Tasikmalaya	1.0321	1.0365	1.0878	1.0587	1.0348	1.0500
23	Bandung Barat	1.0413	1.0468	1.0727	1.0438	1.0571	1.0523
24	Cirebon	1.0400	1.0365	1.0731	1.0733	1.0389	1.0524
25	Kota Cirebon	1.0714	1.0762	1.0790	1.0000	1.0547	1.0562
26	Bogor	1.0775	1.0744	1.0666	1.0596	1.0590	1.0674
	<b>Rata-Rata</b>	<b>1.0187</b>	<b>1.0405</b>	<b>1.0325</b>	<b>1.0265</b>	<b>1.0237</b>	

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menyajikan hasil analisis efisiensi dimana warna hijau menunjukkan daerah yang mencapai skor efisiensi yang efisien sepanjang periode penelitian dan warna kuning merupakan daerah yang efisien di periode tertentu. Dalam konteks penelitian, ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut mampu mengoptimalkan dana belanja sosial yang dimiliki untuk mencapai angka laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini yang optimum.

#### 4.3.2. Keterkaitan Skor Efisiensi dengan Belanja Sosial

Afonso et al. (2005) menyebutkan bahwa unit analisis yang memiliki kemampuan belanja sosial yang besar cenderung lebih efisien apabila dibandingkan dengan yang lain. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya.

**Gambar 4.6. Skor Efisiensi dan Belanja Sosial**

Kota Depok	85								
Kota Cimahi	5			Kota Depok	22				
Kota Sukabumi	30			Kota Cimahi	25				
Kota Bekasi	52			Kota Bandung	128	Kota Depok	9		
Kota Bandung	109			Bekasi	65	Majalengka	38	Kota Depok	10
Majalengka	66			Kota Banjar	1	Kuningan	41	Majalengka	29
Kuningan	42			Ciamis	64	Kota Bekasi	53	Kuningan	32
Ciamis	121			Indramayu	31	Kota Sukabumi	12	Kota Bekasi	56
Purwakarta	8	Kota Depok	80	Kota Bogor	2	Karawang	101	Kota Sukabumi	7
Sukabumi	102	Kota Cimahi	13	Majalengka	24	Kota Cirebon	3	Kota Cimahi	4
Karawang	116	Kota Sukabumi	20	Kuningan	26	Kota Cimahi	6	Bekasi	74
Kabupaten Kota	Belanja Sosial	Kabupaten Kota	Belanja Sosial	Kabupaten Kota	Belanja Sosial	Kabupaten Kota	Belanja Sosial	Kabupaten Kota	Belanja Sosial
2010		2011		2012		2013		2014	

Sumber: Hasil pengolahan data

Gambar di atas menampilkan Kabupaten Kota yang memiliki skor efisiensi yang efisien yang disertai dengan informasi peringkat pengeluaran belanja sosial dengan skala 1 sampai dengan 130, dimana 1 pengeluaran belanja sosial terendah dan 130 merupakan pengeluaran belanja sosial tertinggi. Data tersebut bertentangan dengan temuan Afonso et al. (2005) karena wilayah dengan pengeluaran belanja sosial yang rendahpun bisa memiliki skor efisiensi yang efisien. Kondisi ini terjadi di beberapa DMU seperti Kota Banjar (2012), Kota Bogor (2012), Kota Cirebon (2013) yang mencapai skor efisiensi yang efisien dengan pengeluaran belanja sosial terendah diantara 130 DMU yang digunakan. Namun demikian, penelitian ini tidak sepenuhnya

bertentangan dengan penelitian terdahulu karena daerah dengan pengeluaran belanja sosial yang besarpun terdapat skor yang efisien. Sebagai contoh, Kabupaten Ciamis tahun 2010 mencapai skor efisiensi yang efisien saat pengeluaran belanja sosialnya termasuk 10 DMU yang tertinggi.

Secara umum, keterkaitan antara besarnya pengeluaran belanja sosial dengan skor efisiensi menunjukkan pola yang tidak terstruktur. Kabupaten Kota dengan pengeluaran belanja sosial yang tinggi belum tentu lebih efisien di bandingkan dengan Kabupaten Kota dengan pengeluaran belanja sosial yang rendah, begitupun sebaliknya.

#### **4.3.3. Keterkaitan Skor Efisiensi dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Keterkaitan skor efisiensi dengan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana keterkaitan skor efisiensi suatu daerah efisien dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan mempertimbangkan asumsi *output oriented*, daerah dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya cenderung memiliki skor efisiensi yang efisien. Hasil pengolahan data menunjukkan hasil yang serupa dimana Kabupaten Kota dengan capaian LPE tertinggi memiliki skor efisiensi yang efisien. Kondisi ini diperlihatkan oleh Karawang tahun 2010 yang mencapai skor efisiensi yang efisien dengan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara 130 DMU.

**Gambar 4.7. Skor Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Kota Depok	22			Kota Depok	4				
Kota Cimahi	82			Kota Cimahi	27				
Kota Sukabumi	36			Kota Bandung	2	Kota Depok	11		
Kota Bekasi	52			Bekasi	19	Majalengka	99	Kota Depok	9
Kota Bandung	3			Kota Banjar	81	Kuningan	26	Majalengka	101
Majalengka	113			Ciamis	77	Kota Bekasi	39	Kuningan	23
Kuningan	93			Indramayu	128	Kota Sukabumi	76	Kota Bekasi	66
Ciamis	88			Kota Bogor	24	Karawang	5	Kota Sukabumi	75
Purwakarta	58	Kota Depok	13	Majalengka	37	Kota Cirebon	102	Kota Cimahi	70
Sukabumi	125	Kota Cimahi	69	Kuningan	62	Kota Cimahi	64	Bekasi	49
Karawang	1	Kota Sukabumi	31						
Kabupaten Kota	LPE	Kabupaten Kota	LPE	Kabupaten Kota	LPE	Kabupaten Kota	LPE	Kabupaten Kota	LPE
2010		2011		2012		2013		2014	

Sumber: Hasil pengolahan data

Mengacu pada gambar di atas, sebagai DMU dengan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi, Kabupaten Karawang mencapai skor efisiensi yang efisien. Di samping itu, Kota Depok dan Kota Bandung yang merupakan pemilik pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencapai skor yang efisien dalam beberapa tahun. Namun demikian, Kabupaten Kota yang capaian pertumbuhan ekonominya tidak tinggi juga menunjukkan skor efisiensi yang efisien, contohnya Kabupaten Indramayu di tahun 2012 merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan oleh rendahnya capaian pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten Kota tersebut diiringi dengan capaian tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang lebih baik.

#### 4.3.4. Keterkaitan Skor Efisiensi dengan Tingkat Kemiskinan

Belanja sosial secara definitif mutlak dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan sehingga idealnya Kabupaten Kota yang efisien merupakan Kabupaten Kota dengan capaian tingkat kemiskinan yang rendah.

**Gambar 4.8. Skor Efisiensi dan Tingkat Kemiskinan**

Kota Depok	5			Kota Depok	3				
Kota Cimahi	27			Kota Cimahi	23				
Kota Sukabumi	50			Kota Bandung	6	Kota Depok	1		
Kota Bekasi	22			Bekasi	13	Majalengka	107	Kota Depok	2
Kota Bandung	10			Kota Banjar	31	Kuningan	100	Majalengka	101
Majalengka	121			Ciamis	56	Kota Bekasi	15	Kuningan	92
Kuningan	115			Indramayu	120	Kota Sukabumi	33	Kota Bekasi	14
Ciamis	65	Kota Depok	4	Kota Bogor	40	Karawang	69	Kota Sukabumi	28
Purwakarta	67	Kota Cimahi	16	Majalengka	113	Kota Cirebon	66	Kota Cimahi	16
Sukabumi	68	Kota Sukabumi	46	Kuningan	104	Kota Cimahi	18	Bekasi	11
Karawang	84								
Kabupaten Kota	Miskin	Kabupaten Kota	Miskin	Kabupaten Kota	Miskin	Kabupaten Kota	Miskin	Kabupaten Kota	Miskin
2010		2011		2012		2013		2014	

Sumber: Hasil pengolahan data

Pada bagian ini terlihat dominasi Kota Depok yang efisien dengan capaian tingkat kemiskinan terendah. Namun demikian, efisien-nya Kabupaten Majalengka 2010 dan Indramayu 2012 yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Jawa Barat masih menjadi pertanyaan. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan oleh capaian indeks gini yang lebih baik.

#### 4.3.5. Keterkaitan Skor Efisiensi dengan Ketimpangan Pendapatan

Seperti halnya kemiskinan, penggunaan belanja sosial diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah yang mampu



menurunkan ketimpangan pendapatan. Mempertimbangkan hal tersebut, Kabupaten Kota yang memiliki capaian indeks gini yang rendah seharusnya bisa mencapai skor efisiensi yang lebih baik.

**Gambar 4.9. Skor Efisiensi dan Ketimpangan Pendapatan**

Kota Depok	36			Kota Depok	116				
Kota Cimahi	9			Kota Cimahi	92				
Kota Sukabumi	68			Kota Bandung	126	Kota Depok	110		
Kota Bekasi	10			Bekasi	84	Majalengka	43	Kota Depok	93
Kota Bandung	85			Kota Banjar	108	Kuningan	50	Majalengka	67
Majalengka	7			Ciamis	35	Kota Bekasi	79	Kuningan	91
Kuningan	1			Indramayu	21	Kota Sukabumi	70	Kota Bekasi	51
Ciamis	4			Kota Bogor	129	Karawang	44	Kota Sukabumi	83
Purwakarta	29	Kota Depok	86	Majalengka	107	Kota Cirebon	104	Kota Cimahi	
Sukabumi	3	Kota Cimahi	71	Kuningan	82	Kota Cimahi	117	Bekasi	50
Karawang	13	Kota Sukabumi	69						
Kabupaten Kota	Gini	Kabupaten Kota	Gini	Kabupaten Kota	Gini	Kabupaten Kota	Gini	Kabupaten Kota	Gini
2010		2011		2012		2013		2014	

Sumber: Hasil pengolahan data

Pola pada bagian ini berbeda dengan pola yang terjadi pada keterkaitan skor efisiensi dengan LPE dan kemiskinan. Kabupaten Kota dengan LPE rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki indeks gini yang paling rendah di antara Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sukabumi di tahun 2010 mampu memiliki skor efisiensi yang efisien kemungkinan besar dikarenakan karena capaian indeks gini yang rendah di antara 130 DMU yang lain, artinya Kabupaten Kota tersebut memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata.

#### 4.3.6. Target Output *Data Envelopment Analysis*

Sebagian besar *Decision Making Unit* (DMU) yang dalam hal ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat meraih skor efisiensi di atas 1,000 sehingga dapat dinyatakan DMU tersebut masih perlu memperbaiki capaian outputnya sebesar nilai efisiensi yang dicapai dikurangi 1,000. Selanjutnya, penggunaan *data envelopment analysis* dalam penelitian ini tidak hanya untuk menghitung nilai efisiensi dari masing-masing DMU, penelitian ini juga menganalisis bagaimana DMU yang tidak efisien dalam penggunaan belanja sosial terhadap optimalisasi pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan agar menjadi DMU lebih efisien. Penggunaan metode *data envelopment analysis* melalui pendekatan *output oriented* mampu menghitung berapa output pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini optimal yang harus dicapai oleh masing-masing DMU yang tidak efisien untuk mencapai skor efisiensi yang efisien.

Tabel di bawah ini menunjukkan seberapa besar pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini yang seharusnya dicapai oleh masing-masing Kabupaten dan Kota untuk mencapai efisiensi skor yang efisien dalam penggunaan dana belanja sosial berdasarkan rekomendasi analisis DEA. Pemerintah Kabupaten dan Kota harus bekerja keras untuk memperbaiki capaian ketiga variabel tersebut untuk menghindari inefisiensi penggunaan belanja sosial yang merupakan modal yang dapat digunakan terutama untuk memperbaiki taraf hidup kelompok berpenghasilan rendah.

**Tabel 4–9. Target Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini Kabupaten Kota  
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014**

Kabupaten dan Kota	2010			2011			2012			2013			2014		
	Growth	Miskin	Gini	Growth	Miskin	Gini	Growth	Miskin	Gini	Growth	Miskin	Gini	Growth	Miskin	Gini
Bandung	6.04	6.91	0.27	6.45	4.29	0.33	6.53	4.72	0.33	6.26	4.92	0.32	6.39	4.01	0.35
Bandung Barat	5.71	9.83	0.26	5.96	10.01	0.26	6.51	6.54	0.32	6.21	8.94	0.28	6.12	6.95	0.29
Bekasi	6.23	5.40	0.28	6.75	3.89	0.32	6.53	5.25	0.36	6.40	4.07	0.32	5.88	4.97	0.33
Bogor	7.13	2.40	0.36	7.16	2.38	0.36	7.09	2.32	0.38	6.70	3.81	0.34	6.92	3.20	0.35
Ciamis	5.07	10.34	0.25	5.47	6.76	0.29	5.41	9.61	0.31	5.82	5.69	0.31	5.57	6.36	0.29
Cianjur	5.07	12.41	0.24	5.47	9.52	0.25	5.99	7.11	0.28	5.08	8.61	0.26	5.15	9.91	0.27
Cirebon	5.16	9.69	0.27	5.43	12.36	0.24	5.90	8.23	0.31	5.36	7.90	0.27	5.28	10.74	0.25
Garut	5.56	10.47	0.25	5.55	8.47	0.26	5.58	6.49	0.29	4.82	10.06	0.30	4.92	10.57	0.32
Indramayu	4.99	14.68	0.23	5.18	10.28	0.25	3.18	15.42	0.29	4.11	12.99	0.26	4.95	13.95	0.28
Karawang	11.87	12.21	0.28	6.99	6.00	0.29	5.74	5.97	0.30	7.96	10.69	0.32	5.84	6.30	0.27
Kota Bandung	8.45	4.95	0.36	8.04	3.17	0.40	8.53	4.55	0.42	7.99	2.84	0.40	7.88	2.63	0.39
Kota Banjar	5.77	6.04	0.30	6.20	5.60	0.32	5.32	7.78	0.39	6.26	4.80	0.32	5.63	6.70	0.32
Kota Bekasi	5.84	6.30	0.27	6.80	3.07	0.35	6.86	3.81	0.36	6.04	5.33	0.35	5.62	5.25	0.33
Kota Bogor	6.41	5.49	0.31	6.56	4.25	0.36	6.31	8.47	0.45	7.23	2.32	0.37	6.15	5.56	0.34
Kota Cimahi	5.30	7.40	0.27	5.50	7.15	0.34	6.24	6.67	0.37	5.66	5.63	0.39	5.49	5.47	0.39
Kota Cirebon	5.96	5.24	0.30	6.49	4.26	0.33	6.58	3.45	0.36	4.90	10.54	0.38	6.70	4.83	0.37
Kota Depok	6.36	2.84	0.31	6.81	2.75	0.36	8.06	2.46	0.40	6.85	2.32	0.39	7.28	2.32	0.37
Kota Sukabumi	6.11	9.24	0.34	6.18	8.95	0.34	6.83	4.76	0.38	5.41	8.05	0.34	5.43	7.65	0.36
Kota Tasikmalaya	5.92	10.26	0.30	5.82	9.50	0.35	6.36	7.43	0.34	6.56	6.23	0.35	6.38	7.34	0.35
Kuningan	4.99	14.68	0.23	6.02	8.04	0.28	5.71	13.69	0.36	6.25	13.34	0.33	6.32	12.72	0.37
Majalengka	4.59	15.52	0.26	5.30	8.92	0.26	6.06	14.44	0.39	4.93	14.07	0.32	4.91	13.42	0.34
Purwakarta	5.77	10.57	0.30	6.74	4.50	0.34	7.08	3.62	0.37	7.25	3.44	0.38	6.17	4.95	0.34
Subang	5.20	12.46	0.24	5.31	9.97	0.25	5.60	6.27	0.28	5.31	7.02	0.29	5.32	7.26	0.28
Sukabumi	4.02	10.65	0.25	5.17	7.94	0.28	6.55	7.30	0.33	5.64	6.98	0.28	6.16	6.11	0.30
Sumedang	5.39	10.53	0.25	5.60	6.33	0.28	6.63	7.82	0.36	5.61	6.42	0.30	5.31	8.07	0.31
Tasikmalaya	5.16	11.95	0.24	6.38	4.14	0.31	5.26	7.36	0.30	5.55	6.75	0.28	5.02	8.13	0.26

Sumber: Hasil pengolahan data

#### **4.3.7. Analisis Efisiensi Hasil Pengolahan *Data Envelopment Analysis***

Pada dasarnya, kondisi ideal dari suatu wilayah dalam mencapai 3 variabel output yang dipakai adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah serta ketimpangan pendapatan yang rendah. Namun, berdasarkan data Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat terdapat temuan menarik yang diantaranya adalah :

- 1) Kabupaten dan Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemiskinan yang rendah memiliki permasalahan pada ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dalam kasus penelitian ini terjadi di Kota Bandung dan beberapa wilayah lainnya.
- 2) Kabupaten dan Kota yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah memiliki permasalahan pada tingkat kemiskinan yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dalam kasus penelitian ini terjadi di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur dan beberapa wilayah lainnya.

Penggunaan *data envelopment analysis* dalam penelitian ini mampu menghasilkan skor efisiensi penggunaan belanja sosial terhadap capaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan tidak ada satupun Kabupaten Kota yang mencapai skor yang efisien yang konsisten sepanjang periode penelitian.

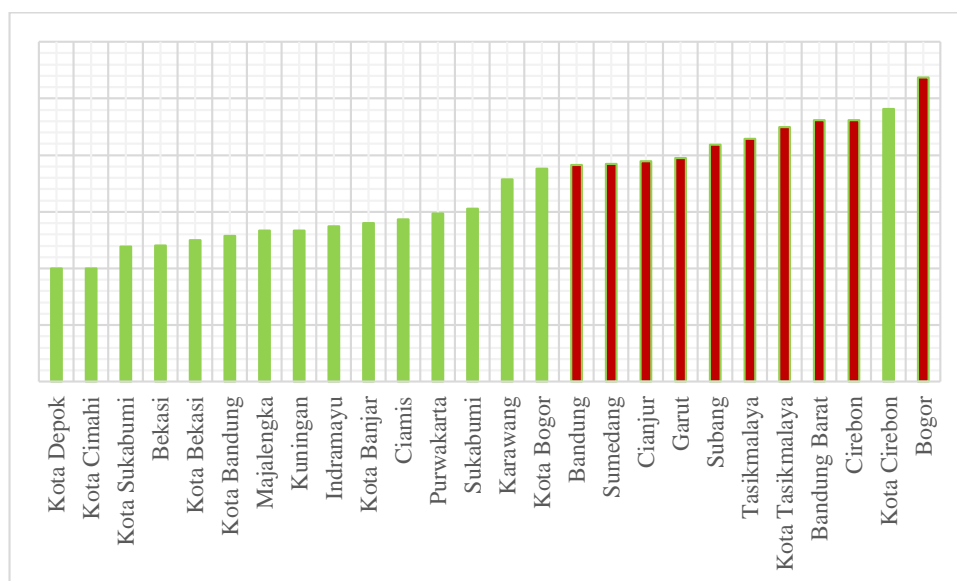
Secara umum, terdapat 39 dari 130 DMU (30 persen) yang mencapai skor efisiensi yang efisien. 39 DMU tersebut terangkum ke dalam 16 Kabupaten Kota.

Penekanan hasil ada pada kata relatif dimana skor efisiensi ini bersifat relatif di antara Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara garis besar, pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan data dari tahun 2010-2014 menghasilkan temuan sebagai berikut:

- 1) Dua daerah tercatat mencapai kondisi efisien sepanjang periode penelitian yaitu Kota Depok dan Kota Cimahi
- 2) Tiga daerah tercatat mencapai kondisi efisien pada 4 periode penelitian yaitu Kota Sukabumi (2010, 2011, 2013, 2014), Kab. Majalengka (2010, 2012, 2013, 2014) serta Kab. Kuningan (2010, 2012, 2013, 2014)
- 3) Satu daerah tercatat mencapai kondisi efisien pada 3 periode penelitian yaitu Kota Bekasi (2010, 2013, 2014)
- 4) Empat daerah tercatat mencapai kondisi efisien pada 2 periode penelitian yaitu Kab. Bekasi (2012, 2014), Kota Bandung (2010, 2012), Kab. Ciamis (2010, 2012) dan Kab. Karawang (2010, 2013),
- 5) Enam daerah tercatat mencapai kondisi efisien pada 1 periode penelitian yaitu Kab. Indramayu (2012), Kota Banjar (2012), Kab. Purwakarta (2010), Kab. Sukabumi (2010), Kota Bogor (2012) dan Kota Cirebon (2013).

Gambar di bawah ini menunjukkan rata-rata skor efisiensi Kabupaten Kota dengan warna hijau merupakan daerah yang pernah mencapai skor efisiensi yang efisien minimal di satu tahun penelitian sedangkan warna merah merupakan daerah yang tidak pernah mencapai skor efisiensi yang efisien sama sekali.

**Gambar 4.10. Skor Efisiensi Rata-Rata Kabupaten Kota**

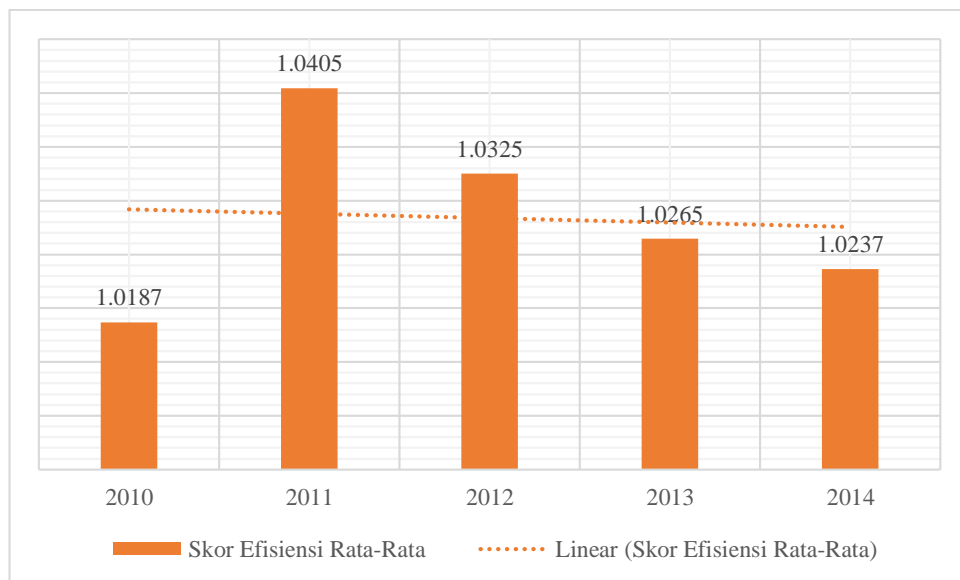


Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan analisis Kabupaten Kota, Kota Depok dan Kota Cimahi yang merupakan DMU yang mencapai kondisi yang efisien menempati rata-rata ekor efisiensi terbaik. Adapun Kabupaten Bogor merupakan DMU yang memiliki skor terendah. Tingginya angka kemiskinan dan indeks gini mengindikasikan salah satu faktor yang menyebabkan tidak efisiennya capaian Kabupaten Bogor. Temuan menarik dari gambar di atas adalah ada pada Kota Bandung. Sebagai DMU dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang rendah, Kota Bandung hanya mencapai skor efisiensi yang efisien sebanyak 2 periode penelitian. Fenomena ini menunjukkan bahwa daerah yang relatif cukup maju belum tentu memiliki capaian skor efisiensi yang baik. Status sebagai daerah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di provinsi Jawa Barat tentunya bisa dijadikan dasar kuat mengenai tidak efisiennya Kota Bandung ini.

Dalam perspektif lain, jika melihat skor efisiensi rata-rata tahunan yang dihasilkan oleh DEA juga menunjukkan adanya pelemahan kinerja penggunaan dana belanja sosial terhadap capaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan dilihat dari nilai efisiensi.

**Gambar 4.11. Skor Efisiensi Rata-rata Tahun 2010-2014**



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Gambar di atas menunjukkan skor efisiensi yang memiliki kecenderungan bergerak ke angka yang lebih kecil. Dengan kata lain angka tersebut berarti bergerak ke yang lebih efisien. Tahun 2010, skor efisiensi rata-rata Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berada di angka 1,0187, artinya Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat secara rata-rata perlu memperbaiki capaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini sebesar 1,87 persen. Hal yang sama terjadi di tahun 2014, secara rata-rata Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki output sebesar 2,37 persen. Oleh karena itu, guna

memperbaiki kinerja pemerintah terkait efisiensi penggunaan belanja sosial masih memerlukan banyak perbaikan.

Secara keseluruhan, penyebab tidak efisiennya skor efisiensi yang dicapai oleh sebagian besar Kabupaten Kota berdasarkan analisis DEA, hanya dikarenakan karena tidak maksimalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini yang diperoleh oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dalam menggunakan sejumlah dana belanja sosial yang dimiliki. Angka target yang ditampilkan sebelumnya, menunjukkan seberapa besar capaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini yang seharusnya bisa dicapai oleh Kabupaten Kota dengan menggunakan dana belanja sosial yang dimiliki agar menjadi wilayah yang efisien.

Permasalahan inefisiensi ini tentunya bisa diminimalisir. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan program-program kegiatan di masing-masing Kabupaten dan Kota melalui perencanaan yang matang dan terukur (The World Bank, 1998). Artinya perencanaan itu wajib melibatkan partisipasi dari semua pihak yang punya kepentingan dengan program instansi tersebut, termasuk masyarakat. Selain itu, perencanaan yang disusun juga memperhatikan aspek ketepatan sasaran dari berbagai program yang akan dijalankan. Tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tidak kunjung membaik disebabkan oleh program yang tidak tepat sasaran. Proses perencanaan yang matang dan terukur ini tentunya harus didukung oleh proses pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi yang baik guna mencapai penggunaan dana belanja sosial yang efisien.



Catatan juga mengarah pada besaran dana belanja sosial yang digunakan oleh Kabupaten dan Kota. Tinggi rendahnya besaran dana belanja sosial yang dimiliki oleh Kabupaten dan Kota, ternyata tidak sepenuhnya menentukan efisien atau tidaknya suatu wilayah. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Kota Banjar (2012), Kota Kota Cimahi (2010, 2010 dan 2014) serta Kota Depok (2013, 2014) yang mampu mencapai skor efisiensi yang efisien dengan menggunakan dana belanja sosial yang rendah di Provinsi Jawa Barat di antara seluruh tahun penelitian. Hal ini sedikit bersebrangan dengan penelitian Afonso et al. (2005) yang menerangkan daerah dengan belanja yang lebih tinggi cenderung lebih efisien dari daerah dengan belanja yang lebih rendah.

Terakhir, satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyebab inefisiensi yang terjadi, secara tepat tidak bisa diidentifikasi dan diuraikan oleh DEA. Namun demikian, model DEA mampu menyajikan fondasi untuk mendalami studi lebih lanjut mengenai efisiensi penggunaan belanja sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

#### **4.4. Model Pengaruh Belanja Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.**

Hasil studi yang dilakukan oleh Barrientos (2012) yang berjudul *Social Transfers and Growth: What Do We Know? What Do We Need to Find Out?*, Barrientos menemukan sebuah *framework* bahwa belanja sosial memiliki pengaruh yang baik terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui capaian pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, berbagai studi seperti yang dilakukan oleh Furceri & Zdzienicka (2012), Celikay & Gumus (2017) serta Anderson et al.

(2017) menjelaskan juga mengenai bagaimana pengeluaran belanja sosial mampu berperan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Mengacu pada studi tersebut, pada bagian ini akan dilakukan analisis bagaimana pengaruh penggunaan belanja sosial terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten dan Kota pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang diharapkan mampu mempertajam analisis studi ini. Pada analisis ini digunakan model ekonometrika dengan menggunakan pendekatan panel data. Penggunaan model ekonometrika panel didasarkan pada penggunaan data 26 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat (*Cross Section*) pada tahun 2010-2014 (*time series*) secara bersamaan. Analisis ini diawali dengan uji hausman yang digunakan untuk menentukan penggunaan *fixed* atau *random effect* dalam analisis regresi. Selain itu, pengujian asumsi klasik seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas serta autokorelasi juga dilakukan untuk mendapatkan estimator yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

#### **4.4.1. Model Pengaruh Belanja Sosial dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Model ini dibangun untuk melihat bagaimana pengaruh belanja sosial terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Furceri & Zdzienicka (2012) serta Baldacci, Clements, Gupta, & Cui (2008). Pada dasarnya, hasil dari model ini diharapkan dapat menjelaskan apakah peningkatan belanja sosial dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, atau sebaliknya peningkatan belanja sosial akan menurunkan capaian pertumbuhan ekonomi. Dalam model ini, ditambahkan variabel IPM sebagai variabel kontrol.

#### 4.4.1.1. Uji Hausman

Uji hausman menunjukkan *p-value* sebesar 0,6004 yang lebih dari alpha 5 persen sehingga analisis regresi menggunakan pendekatan *random effect*.

**Tabel 4–10. Uji Hausman Model Pertumbuhan Ekonomi**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.020374	2	0.6004

Sumber: Hasil pengolahan data

#### 4.4.1.2. Output Pengolahan Data

Berikut merupakan hasil pengolahan data dari model pengaruh penggunaan dana belanja sosial dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di 26 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2014.

**Tabel 4–11. Ouput Regresi Model Pertumbuhan Ekonomi**

Dependent Variable: GROWTH?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.649013	2.302961	-2.887159	0.0046
LOG(BANSOS?)	0.329922	0.146206	2.256552	0.0257
IPM?	0.124993	0.020793	6.011441	0.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.149245	Mean dependent var	2.722266
Adjusted R-squared	0.135848	S.D. dependent var	0.873787
S.E. of regression	0.812270	Sum squared resid	83.79245
F-statistic	11.13961	Durbin-Watson stat	1.610311
Prob(F-statistic)	0.000035		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.309930	Mean dependent var	5.603720
Sum squared resid	133.8799	Durbin-Watson stat	1.007858

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9, model ini menunjukkan hasil dimana belanja sosial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya setiap peningkatan besaran belanja sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka akan disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, pengaruh positif juga terlihat dari variabel IPM yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan IPM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana tabel tersebut dapat disederhanakan dalam persamaan berikut ini:

$$\text{Growth}_{it} = -6,649013 + 0,329922.\text{Ln}(\text{Bansos})_{it} + 0,124993.\text{IPM}_{it} + 0.812270$$

Berikut merupakan interpretasi dari model pengaruh bantuan sosial dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi.

- Koefisien regresi belanja sosial (LOG(BANSOS?)) sebesar 0,329922 memiliki arti bahwa setiap peningkatan belanja sosial sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,329922 persen. *Ceteris paribus*.
- Koefisien regresi IPM sebesar 0,124993 memiliki arti bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124993 persen. *Ceteris paribus*.

#### **4.4.1.3. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi merupakan nilai menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dependen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) pada model pengaruh belanja sosial dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.149245, artinya variabel belanja sosial dan IPM mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 14,92 persen, sedangkan 84,08 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat variabel dominan lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

#### **4.4.1.4. Uji Signifikansi Parsial (Uji T-Statistik)**

Penggunaan uji T adalah untuk melihat adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu dalam tingkat signifikansi tertentu. Berikut merupakan nilai batas kritis untuk pengujian T-statistik model pengaruh belanja sosial dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4–12. Hasil Pengujian T-Statistik Model Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel	T-Stat	T-Tabel (df = n-k = 130-3 = 127)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
LOG(BANSOS?)	2.2566	2.35607	1.65694	1.28825	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
IPM	6.0114	2.35607	1.65694	1.28825	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel belanja sosial dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial.

- T-Hitung variabel belanja sosial sebesar 2.2566 lebih besar dari T-Tabel untuk untuk alpha 5% sehingga Ho ditolak. Maka variabel belanja sosial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 95 persen.
- T-Hitung variabel IPM sebesar 6.0114 lebih besar dari T-Tabel untuk untuk alpha alpha 1, 5 dan 10% sehingga Ho ditolak. Maka variabel IPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 90, 95 maupun 99 persen.

#### 4.4.1.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Statistik)

Uji F-statistik digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari persamaan regresi atau untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat dalam persamaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tabel

berikut menunjukkan hasil uji F pada model pengaruh belanja sosial dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4–13. Hasil Pengujian F-Statistik Model Pertumbuhan Ekonomi**

F-Stat	Prob	F-Tabel (df1 = k-1 = 3-1 = 2) (df2 = n-k = 130-3 = 127)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
11.13961	0.000035	4.78	3,07	2,34	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengolahan data, F-Hitung model sebesar 11.13961 lebih besar dari F-Tabel untuk untuk alpha 1% (4.78) sehingga Ho ditolak. Maka seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama pada tingkat kepercayaan 99%.

#### 4.4.1.6. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan masalah yang terdapat pada variabel independen yang memiliki ikatan yang erat atau hubungan yang saling berpengaruh dalam model regresi. Sebuah model persamaan diindikasikan terdapat permasalahan multikolinearitas apabila  $R^2$  nya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel independennya yang signifikan pada pengujian t-statistik. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan analisis *pairwise matrix correlation* dengan kriteria jika nilai korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas.

**Tabel 4–14. Pairwise Matrix Correlation Belanja Sosial dan IPM**

	BANSOS	IPM
BANSOS	1	-0.1006
IPM	-0.1006	1

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa belanja sosial dan IPM hanya memiliki nilai korelasi sebesar -0,1006 sehingga pada model pengaruh belanja sosial dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### **4.4.1.7. Uji Heteroskedastisitas**

Masalah heteroskedastisitas muncul karena varians dari setiap *error terms* tidak konstan. Konsekuensi dari masalah ini adalah bahwa penaksiran tidak lagi efisien karena memiliki varians yang tidak lagi minimum. Berikut merupakan hasil analisis uji *white heteroscedasticity* dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas.

- Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas
- Ha: Terdapat Heteroskedastisitas

Dengan kriteria:

- Jika  $Obs \cdot R\text{-Squared} < \text{Chi-Squared Tabel}$  pada alpha 5% maka Ho Tidak Ditolak, Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
- Jika  $Obs \cdot R\text{-Squared} > \text{Chi-Squared Tabel}$  pada alpha 5% maka Ho Tidak Ditolak

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai  $Obs \cdot R\text{-Squared} = 2.79253$  lebih kecil dari Chi-squared Tabel sebesar 154.302 sehingga Ho tidak ditolak dan tidak terdapat heteroskedastisitas



#### 4.4.1.8. Uji Autokorelasi

Masalah Autokorelasi dalam model merupakan masalah linear yang menunjukkan adanya korelasi antar anggota observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam menguji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *durbin watson* berikut.

**Gambar 4.12. Uji Durbin Watson Autokorelasi Model Pertumbuhan Ekonomi**



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai *durbin Watson* statistic sebesar 1.6103 berada di bawah nilai  $DL = 1.6667$  sehingga dapat disimpulkan pada model ini terdapat autokorelasi positif. Pada penelitian ini estimasi model telah dilakukan dengan metode EGLS (*Estimated Generalized Least Square*) dan juga menggunakan PCSE (*Panel Corrected Standard Errors*) dimana pada model ini masalah otokorelasi sudah diminimalisir. Hal ini terlihat dari nilai *durbin watson* statistik yang meningkat menuju wilayah yang tidak terdapat autokorelasi dari nilai 1.0079 ke 1.6103 sehingga masalah autokorelasi sudah diminimalisir.

#### 4.4.2. Model Pengaruh Belanja sosial dan Indeks Daya Beli Terhadap Kemiskinan

Model ini dibangun untuk melihat bagaimana pengaruh belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan yang mengacu pada penelitian Celikay & Gumus (2017). Pada dasarnya, hasil dari model ini diharapkan dapat menjelaskan apakah peningkatan belanja sosial mampu mengurangi permasalahan kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, atau sebaliknya peningkatan belanja sosial akan meningkatkan capaian tingkat kemiskinan. Dalam model ini, ditambahkan variabel indeks daya beli sebagai variabel kontrol.

##### 4.4.2.1. Uji Hausman

Uji hausman menunjukkan *p-value* sebesar 0,0000 yang kurang dari alpha 5 persen sehingga analisis regresi menggunakan pendekatan *fixed effect*.

**Tabel 4–15. Uji Hausman Model Kemiskinan**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	77.992165	2	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data

##### 4.4.2.2. Output Pengolahan Data

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel bantuan sosial dan indeks daya beli sama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2014. Hanya saja, perbedaan ada pada arah pengaruhnya. Jika indeks daya beli berdampak bagi penurunan

kemiskinan, variabel bantuan sosial malah berdampak meningkatkan tingkat kemiskinan. Berikut merupakan hasil pengolahan data model pengaruh belanja sosial dan indeks daya beli terhadap tingkat kemiskinan.

**Tabel 4–16. Output Regresi Model Kemiskinan**

Dependent Variable: POVERTY?

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	98.03308	3.067557	31.95803	0.0000
LOG(BANSOS?)	0.300507	0.057582	5.218773	0.0000
IDB?	-1.352933	0.043964	-30.77386	0.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.994773	Mean dependent var	14.76775
Adjusted R-squared	0.993390	S.D. dependent var	7.800422
S.E. of regression	0.396206	Sum squared resid	16.01184
F-statistic	719.0119	Durbin-Watson stat	1.610935
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.990941	Mean dependent var	10.42668
Sum squared resid	16.21796	Durbin-Watson stat	1.285738

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Secara sederhana tabel output regresi tersebut dapat disederhanakan dalam persamaan berikut ini:

$$Poverty_{it} = 98.03308 + 0.300507 \cdot \ln(Bansos)_{it} - 1.352933 \cdot IDB_{it} + 0.396206$$

Hasil pengolahan mengenai analisis pengaruh belanja sosial dan indeks daya beli terhadap tingkat kemiskinan dapat disimpulkan dengan interpretasi berikut ini :

- Koefisien regresi belanja sosial (LOG(BANSOS?)) sebesar 0.300507 memiliki arti bahwa setiap peningkatan dana belanja sosial sebesar 1 persen

maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.300507 persen.

*Ceteris paribus.*

- Koefisien regresi indeks daya beli (IDB?) sebesar -1.352933 memiliki arti bahwa setiap peningkatan indeks daya beli sebesar 1 basis poin maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.352933 persen. *Ceteris paribus.*

#### **4.4.2.3. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi merupakan nilai menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dependen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) pada model pengaruh belanja sosial dan indeks daya beli terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0.994773, artinya variabel belanja sosial dan indeks daya beli mampu menjelaskan variabel tingkat kemiskinan sebesar 99,48 persen, sedangkan 0.52 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### **4.4.2.4. Uji Signifikansi Parsial (Uji T-Statistik)**

Penggunaan uji T adalah untuk melihat adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu dalam tingkat signifikansi tertentu. Berikut merupakan nilai batas kritis untuk pengujian T-statistik model pengaruh belanja sosial dan indeks daya beli terhadap tingkat kemiskinan.

**Tabel 4–17. Hasil Pengujian T-Statistik Model Kemiskinan**

Variabel	T-Stat	T-Tabel (df = n-k = 130-3 = 127)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
LOG(BANSOS?)	5.2187	2.35607	1.65694	1.28825	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 1\%$
IDB	-30.774	2.35607	16.5694	1.28825	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel belanja sosial dan indeks daya beli memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara parsial.

- T-Hitung variabel belanja sosial sebesar 5.218773 lebih besar dari T-Tabel untuk untuk alpha 1% (2,35607) sehingga Ho ditolak. Maka variabel belanja sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada tingkat kepercayaan 99 persen.
- T-Hitung variabel indeks daya beli sebesar -30.77386 lebih kecil dari (minus) T-Tabel untuk untuk alpha 1% (-2,35607) sehingga Ho ditolak. Maka variabel indeks daya beli memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada tingkat kepercayaan 99 persen.

#### 4.4.2.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Statistik)

Uji F-statistik digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari persamaan regresi atau untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat dalam persamaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tabel

berikut menunjukkan hasil uji F pada model pengaruh belanja sosial dan indeks daya beli terhadap tingkat kemiskinan.

**Tabel 4–18. Hasil Pengujian F-Statistik Model Kemiskinan**

F-Stat	Prob	F-Tabel (df1 = k-1 = 3-1 = 2) (df2 = n-k = 130-3 = 127)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
		719.0119	0.0000	4.78		

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian di atas, F-Hitung model sebesar 719,0119 lebih besar dari F-Tabel untuk untuk alpha 1% (4.78) sehingga Ho ditolak. Maka seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama pada tingkat kepercayaan 99%.

#### 4.4.2.6. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan masalah yang terdapat pada variabel independen yang memiliki ikatan yang erat atau hubungan yang saling berpengaruh dalam model regresi. Sebuah model persamaan diindikasikan terdapat permasalahan multikolinearitas apabila  $R^2$  nya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel independennya yang signifikan pada pengujian t-statistik. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan analisis *pairwise matrix correlation* dengan kriteria jika nilai korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas.

**Tabel 4–19. Pairwise Matrix Correlation Belanja sosial dan Indeks Daya Beli**

	BANSOS	IDB
BANSOS	1	-0.071399
IDB	-0.071399	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa belanja sosial dan indeks daya beli hanya memiliki nilai korelasi sebesar 0,0714 sehingga pada model pengaruh belanja sosial dan indeks daya beli terhadap tingkat kemiskinan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### **4.4.2.7. Uji Heteroskedastisitas**

Masalah heteroskedastisitas muncul karena varians dari setiap *error terms* tidak konstan. Konsekuensi dari masalah ini adalah bahwa penaksiran tidak lagi efisien karena memiliki varians yang tidak lagi minimum. Berikut merupakan hasil analisis uji *white heteroscedasticity* dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas.

- Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas
- Ha: Terdapat Heteroskedastisitas

Dengan kriteria:

- Jika  $\text{Obs} \cdot R\text{-Squared} < \text{Chi-Squared Tabel}$  pada alpha 5% maka Ho Tidak Ditolak, Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
- Jika  $\text{Obs} \cdot R\text{-Squared} > \text{Chi-Squared Tabel}$  pada alpha 5% maka Ho Tidak Ditolak

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai  $\text{Obs} \cdot R\text{-Squared} = 43.97653$  lebih kecil dari Chi-squared Tabel sebesar 154.302 sehingga Ho tidak ditolak dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### 4.4.2.8. Uji Autokorelasi

Masalah Autokorelasi dalam model merupakan masalah linear yang menunjukkan adanya korelasi antar anggota observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam menguji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *durbin watson* berikut.

**Gambar 4.13. Uji Durbin Watson Autokorelasi Model Kemiskinan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai *durbin Watson* statistic sebesar 1.2857 berada diantara nilai 0 dan DL sehingga dapat disimpulkan pada model ini terdapat masalah autokorelasi. Pada penelitian ini estimasi model telah dilakukan dengan metode EGLS (*Estimated Generalized Least Square*) dan juga menggunakan PCSE (*Panel Corrected Standard Errors*) dimana pada model ini masalah otokorelasi sudah diminimalisir. Hal ini terlihat dari nilai *durbin watson* statistik yang meningkat menuju wilayah yang tidak terdapat autokorelasi dari nilai 1.2857 ke 1.6109 walaupun masih pada wilayah autokorelasi positif.



#### 4.4.3. Model Pengaruh Belanja sosial dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Model ini dibangun untuk melihat bagaimana pengaruh belanja sosial terhadap ketimpangan pendapatan yang mengacu pada penelitian Anderson et al. (2017). Pada dasarnya, hasil dari model ini diharapkan dapat menjelaskan apakah peningkatan belanja sosial mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, atau sebaliknya peningkatan belanja sosial akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dalam model ini, ditambahkan variabel tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol.

##### 4.4.3.1. Uji Hausman

Uji hausman menunjukkan *p-value* sebesar 0,1418 yang lebih dari alpha 5 persen sehingga analisis regresi menggunakan pendekatan *random effect*.

**Tabel 4–20. Uji Hausman Model Kemiskinan**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.906095	2	0.1418

Sumber: Hasil pengolahan data

##### 4.4.3.2. Output Pengolahan Data

Berikut merupakan hasil pengolahan data model pengaruh belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan.

**Tabel 4–21. Output Regresi Model Ketimpangan Pendapatan**

Dependent Variable: GINI?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.589483	0.076782	7.677377	0.0000
LOG(BANSOS?)	-0.019455	0.006672	-2.915979	0.0042
TPT?	-0.003165	0.001472	-2.150605	0.0334

Weighted Statistics			
R-squared	0.097833	Mean dependent var	0.134162
Adjusted R-squared	0.083625	S.D. dependent var	0.034673
S.E. of regression	0.033191	Sum squared resid	0.139913
F-statistic	6.886050	Durbin-Watson stat	1.377457
Prob(F-statistic)	0.001448		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.009468	Mean dependent var	0.337154
Sum squared resid	0.289480	Durbin-Watson stat	0.665759

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Secara sederhana tabel tersebut dapat disederhanakan dalam persamaan berikut ini:

$$\text{Gini}_{it} = 0.589483 - 0.019455 \cdot \text{Ln}(\text{Bansos})_{it} - 0.003165 \cdot \text{TPT}_{it} + 0.033191$$

Hasil pengolahan mengenai analisis pengaruh belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan dapat disimpulkan dengan interpretasi berikut ini :

- Koefisien regresi belanja sosial (LOG(BANSOS?)) sebesar -0.019455 memiliki arti bahwa setiap peningkatan dana belanja sosial sebesar 1 persen maka akan menurunkan indeks gini sebesar 0.019455 basis poin. *Ceteris paribus*.

- Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka (TPT?) sebesar -0.003165 memiliki arti bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen maka akan menurunkan indeks gini sebesar 0.003165 basis poin. *Ceteris paribus*.

#### **4.4.3.3. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi merupakan nilai menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dependen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) pada model pengaruh belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan sebesar 0.097833, artinya variabel belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka mampu menjelaskan variabel indeks gini sebesar 9,78 persen, sedangkan 90,22 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### **4.4.3.4. Uji Signifikansi Parsial (Uji T-Statistik)**

Penggunaan uji T adalah untuk melihat adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu dalam tingkat signifikansi tertentu. Berikut merupakan nilai batas kritis untuk pengujian T-statistik pengaruh belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan.

**Tabel 4–22. Hasil Pengujian T-Statistik Model Ketimpangan Pendapatan**

Variabel	T-Stat	T-Tabel (df = n-k = 130-3 = 127)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
LOG(BANSOS?)	-2.916	2.35607	1.65694	1.28825	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 1\%$
TPT	-2.1506	2.35607	1.65694	1.28825	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara parsial.

- T-Hitung variabel belanja sosial sebesar -2.916 lebih kecil dari (minus) T-Tabel untuk untuk alpha 1% (-2.35607) sehingga Ho ditolak. Maka variabel belanja sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel indeks gini pada tingkat kepercayaan 99 persen.
- T-Hitung variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar -2.1506 lebih kecil dari (minus) T-Tabel untuk untuk alpha 5% (-1.65694) sehingga Ho ditolak. Maka variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

#### 4.4.3.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Statistik)

Uji F-statistik digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari persamaan regresi atau untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat dalam persamaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tabel berikut menunjukkan hasil uji F pada model pengaruh belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan.

**Tabel 4–23. Hasil Pengujian F-Statistik Model Ketimpangan Pendapatan**

F-Stat	Prob	F-Tabel (df1 = k-1 = 3-1 = 2) (df2 = n-k = 130-3 = 127)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
6.886050	0.001148	4.78	3,07	2,34	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 1\%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian di atas, F-Hitung model sebesar 6.886050 lebih besar dari F-Tabel untuk untuk alpha 1% (4.78) sehingga Ho ditolak. Maka seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama pada tingkat kepercayaan 99%.

#### 4.4.3.6. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan masalah yang terdapat pada variabel independen yang memiliki ikatan yang erat atau hubungan yang saling berpengaruh dalam model regresi. Sebuah model persamaan diindikasikan terdapat permasalahan multikolinearitas apabila  $R^2$  nya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel independennya yang signifikan pada pengujian t-statistik. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan analisis *pairwise matrix correlation* dengan kriteria jika nilai korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas.

**Tabel 4–24. Pairwise Matrix Correlation Belanja sosial dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

	BANSOS	TPT
BANSOS	1	0.097197
TPT	0.097197	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka hanya memiliki nilai korelasi sebesar 0,097 sehingga pada model pengaruh belanja sosial dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### 4.4.3.7. Uji Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas muncul karena varians dari setiap *error terms* tidak konstan. Konsekuensi dari masalah ini adalah bahwa penaksiran tidak lagi efisien karena memiliki varians yang tidak lagi minimum. Berikut merupakan hasil analisis uji *white heteroscedasticity* dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas.

- Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas
- Ha: Terdapat Heteroskedastisitas

Dengan kriteria:

- Jika  $Obs \cdot R\text{-Squared} < \text{Chi-Squared Tabel pada alpha } 5\%$  maka Ho Tidak Ditolak, Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
- Jika  $Obs \cdot R\text{-Squared} > \text{Chi-Squared Tabel pada alpha } 5\%$  maka Ho Tidak Ditolak

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai  $Obs \cdot R\text{-Squared} = 1.70248$  lebih kecil dari  $\chi^2$  Tabel sebesar 154.302 sehingga  $H_0$  tidak ditolak dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### 4.4.3.8. Uji Autokorelasi

Masalah Autokorelasi dalam model merupakan masalah linear yang menunjukkan adanya korelasi antar anggota observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam menguji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *durbin watson* berikut.

**Gambar 4.14. Uji *Durbin Watson* Autokorelasi Model Ketimpangan Pendapatan**



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai *durbin Watson* statistic sebesar 0.6658 berada diantara nilai 0 dan DL sehingga dapat disimpulkan pada model ini terdapat masalah autokorelasi positif. Pada penelitian ini estimasi model telah dilakukan dengan metode EGLS (*Estimated Generalized Least Square*) dan juga menggunakan PCSE (*Panel Corrected Standard Errors*) dimana pada model ini masalah otokorelasi sudah diminimalisir. Hal ini terlihat dari nilai *durbin watson*

statistik yang meningkat menuju wilayah yang tidak terdapat autokorelasi dari nilai 0.6658 ke 1.3775 walaupun masih pada wilayah autokorelasi positif.

#### **4.4.4. Analisis Model Pengaruh Belanja sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sampai dengan saat ini masih menjadi komponen utama perencanaan pembangunan. Tidak hanya pada tingkat lokal, nasional namun saat ini ketiganya masuk ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus selesai di tahun 2030. Melihat urgensi tersebut, negara-negara di dunia termasuk pemerintah daerah di dalamnya berupaya keras untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan kemiskinan sampai dengan ke titik nol dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

##### **4.4.4.1. Mengejar Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Sosial Berbasis Perbaikan SDM**

Belanja sosial secara definisi sebetulnya bukan belanja pemerintah yang dialokasikan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, belanja sosial tidak bisa dilepaskan dari komponen pengeluaran pemerintah yang nilainya digunakan untuk menghitung PDRB sehingga tetap memiliki kontribusi untuk capaian pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2004). Furceri & Zdzienicka (2012) menyebutkan bahwa setiap peningkatan belanja sosial sebesar 1 persen akan



mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat 0,1 persen. Dampak positif ini juga ditemui dalam penelitian ini dimana setiap peningkatan belanja sosial sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,329 persen. Akan tetapi, bagaimanapun pengeluaran belanja sosial tidak dapat dijadikan sumber utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Baldacci, Clements, Gupta, & Cui (2008) menyebutkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan merupakan instrument penting yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Temuan ini semakin meyakinkan bahwa human capital mampu berperan sangat besar dalam aktifitas ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai studi empiris termasuk penelitian ini sudah menyebutkan bahwa belanja sosial dan *human capital* memiliki peran besar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa tantangannya terletak pada bagaimana pertumbuhan ekonomi ini mampu mendorong kehidupan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tentunya harus disertai dengan kesiapan masyarakat dalam menyambut manfaat dari tingginya capaian pertumbuhan ekonomi.

Dalam konsep yang ideal, peningkatan pertumbuhan ekonomi setidaknya akan mampu meningkatkan kesempatan kerja, penerimaan dan konsumsi masyarakat di suatu negara atau daerah. Peningkatan kesempatan kerja akan mengurangi tingkat pengangguran, penerimaan negara atau daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam pelayanan publik, adapun peningkatan konsumsi masyarakat akan

mendorong tingkat investasi publik maupun swasta sehingga ketiganya akan mampu mendorong tingkat produktivitas suatu negara atau daerah dalam menghasilkan nilai ekonomi dari suatu barang dan jasa. Jika sebagian besar masyarakat belum memiliki kesiapan yang setidaknya dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kesehatan yang baik maka manfaat tersebut tidak akan bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang memang sangat membutuhkan manfaat dari pertumbuhan itu sendiri yang pada akhirnya kesempatan yang datang pada akhirnya hanya dirasakan oleh masyarakat yang siap menyambutnya.

Sebagai Provinsi dengan 46 juta penduduk yang tersebar di 27 Kabupaten Kota, rata-rata lama sekolah penduduknya masih jauh dari angka 12 tahun. Permasalahan muncul ketika dengan cara apa penduduk dengan kualifikasi tersebut mampu menyambut suatu kesempatan kerja yang semakin luas namun menuntut kemampuan untuk menguasai teknologi informasi dan Bahasa. Pada akhirnya sebagian besar masyarakat kelompok menengah dan bawah tidak memiliki pilihan yang lebih banyak yang bisa menuntun kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung hasil studi ini yang menyebutkan bahwa belanja sosial dan human capital mampu mendorong capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, perbaikan kualitas SDM dari aspek pendidikan dan kesehatan mutlak harus dibenahi. Pendidikan dan kesehatan merupakan alat untuk mendapatkan pilihan kehidupan yang lebih baik, semakin tinggi tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan suatu masyarakat maka akan semakin terbuka akses untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Begitupun dengan belanja sosial, penggunaan dana belanja sosial yang berasal dari bantuan sosial,

bantuan keuangan dan hibah sebisa mungkin dialokasikan untuk perbaikan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan karena keduanya merupakan investasi yang baru akan dirasakan hasilnya dalam jangka panjang (Barrientos, 2012). Upaya ini dirasakan sangat penting agar masyarakat Jawa Barat seluruhnya siap untuk menyambut manfaat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya, jauh dari kemiskinan dan ketimpangan.

#### **4.4.4.2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Penggunaan Belanja Sosial yang Efektif dan Efisien.**

Dalam mengembangkan konsep *Multidimensional Poverty Index*, Oxford Poverty and Human Development Initiative (2010) menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan faktor makanan dan non-makanan yang tergabung pada aspek standar hidup. Kemiskinan juga harus memperhatikan aspek pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Studi ini kembali mengangkat bagaimana peran human capital dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain, *human capital* merupakan syarat utama untuk keluar dari kemiskinan.

Studi ini menunjukkan temuan yang tidak ideal mengenai bagaimana belanja sosial bekerja di lapangan. Dengan ditemukannya hubungan positif signifikan antara belanja sosial dan kemiskinan, hal ini mencerminkan adanya kesalahan besar dalam realisasi belanja sosial untuk masyarakat. Bagaimana bisa anggaran yang khusus diperuntukan untuk mengurangi kemiskinan malah menjadikan kemiskinan terus meningkat. Hal ini seperti membiarkan permasalahan kemiskinan menjadi suatu

siklus, dimana kelompok berpenghasilan rendah bisa keluar dari kemiskinan dalam jangka pendek namun kembali miskin dalam jangka panjang. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Celikay & Gumus (2017) yang menyatakan bahwa tidak selamanya belanja sosial akan berdampak mengurangi kemiskinan, di sisi yang lain besarnya belanja sosial juga akan bisa meningkatkan kemiskinan apabila dana tersebut digunakan tidak tepat sasaran dan diperuntukan untuk program yang tidak berkelanjutan sehingga manfaat dari belanja sosial tersebut tidak tepat sasaran, jikapun tepat sasaran dampaknya hanya akan dirasakan dalam jangka pendek.

Pada variabel indeks daya beli, hubungan yang tidak sesuai tidak ditemukan mengingat semakin tinggi daya beli sudah pasti akan menurunkan kemiskinan. Selanjutnya permasalahan ada pada bagaimana pemerintah mampu menindaklanjuti permasalahan yang sangat aneh ini. Menghapus belanja sosial yang bersumber dari bantuan sosial, bantuan keuangan dan hibah tentunya bukan sebuah opsi yang bisa dilakukan mengingat anggaran tersebut memang diperuntukan khusus untuk kelompok berpenghasilan rendah. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja sosial ini yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tata kelola yang sudah ditentukan dimulai dari pemutakhiran data kemiskinan yang bersifat mikro.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota di dalamnya sebetulnya sudah melakukan kebijakan ke arah tersebut dengan melakukan pemutakhiran data *social protection* yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Inovasi berupa pemutakhiran data kemiskinan yang bersifat mikro sudah terkoneksi internet berbasis webGIS memungkinkan seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses dan memperbarui data kemiskinan berdasarkan nama,

alamat, gambar dan kordinatengan masi pendidikan, asset dan beberapa informasi personal lainnya yang dapat meminimalisir penggunaan belanja sosial yang diimplementasikan melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Namun demikian, tanpa mengabaikan segala bentuk keberhasilan yang sudah dicapai dan direncanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat masih merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota harus bisa berperan lebih baik dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan studi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah penggunaan dana belanja sosial harus menghadirkan kembali program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Program tersebut tentunya harus memperhatikan konsep *value for money* yang menekankan nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta tata kelola yang baik guna mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan melalui bekal pendidikan tinggi, kehidupan yang sehat dan daya beli yang mumpuni.

#### **4.4.4.3. Belanja Sosial Tepat Sasaran dan Berkelanjutan dan Upah Layak Untuk Mengurangi Ketimpangan Pendapatan**

Ekonom asal Prancis François Bourguignon (2004) menyatakan bahwa untuk peranan pertumbuhan ekonomi akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan ketika suatu daerah memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih merata. Pandangan tersebut menyatakan bahwa indikator ketimpangan pendapatan memiliki

peranan yang strategis dalam proses pembangunan sehingga dalam beberapa waktu terakhir sudah anggaran untuk kemiskinan diharapkan juga untuk bisa mengurangi ketimpangan.

Berbicara mengenai ketimpangan pendapatan, Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki pola yang unik. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Kabupaten Kota yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah cenderung memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Kota dengan capaian ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kemiskinan yang rendah. Karakteristik ini menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada kecenderungan terjadi pemerataan kemiskinan, kondisi yang tidak pernah diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan.

Anderson et al. (2017) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja sosial memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, setiap peningkatan belanja sosial yang dikeluarkan akan mengurangi angka ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan oleh indeks gini. Studi ini menunjukkan temuan serupa, dimana setiap peningkatan belanja sosial sebesar 1 persen akan berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan sebesar 0.5895 poin. Kondisi ini menghadirkan optimisme bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Jawa Barat dalam upaya pengurangan ketimpangan. Temuan tersebut tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan harus diperhatikan dengan sangat hati-hati karena akan sangat sensitive terhadap berbagai kepentingan. Misalnya penggunaan dana bantuan sosial akan menurunkan ketimpangan yang bergantung pada seberapa besar bantuan sosial itu ditujukan pada rumah tangga sasaran yang tepat (Milanovic, 1994). Begitupun dengan penggunaan dana bantuan keuangan yang sering kali dinikmati oleh kelompok berpenghasilan menengah ke atas (Ravi et al., 2014). Sekali lagi literature menyebutkan bahwa *human capital* memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengatasi permasalahan ini.

Menilik penggunaan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang memiliki pengaruh negatif terhadap indeks gini. Hal ini merupakan temuan yang sangat menarik karena menunjukkan adanya permasalahan yang cukup besar di pasar tenaga kerja. Hal ini berkaitan dengan bagaimana bisa semakin tinggi TPT maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Artinya semakin banyak penduduk yang bekerja maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Terjadinya fenomena tersebut cenderung dikarenakan oleh jumlah tenaga kerja yang meningkat hanya dalam konteks kuantitas namun tidak mencerminkan kualitas. Kondisi tersebut tidak akan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan mengingat yang dilihat merupakan peningkatan jumlah tenaga kerja secara menyeluruh bukan seberapa besar peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh seseorang ketika bekerja terutama kelompok berpenghasilan rendah (Yusuf, 2018)

Sekali lagi, mengurangi ketimpangan pendapatan bukan hanya sekedar upaya menjalankan fungsi pemerintah dalam hal alokasi dan stabilisasi namun lebih

ke arah fungsi distribusi. Capaian ketimpangan yang baik harus disertai dengan komitmen sosial yang tinggi yang tidak melibatkan unsur politik, tepat sasaran dan berkelanjutan terutama bagaimana pemerintah mendidik dan menghasilkan masyarakat dengan *human capital* yang baik, karena dengan *human capital* yang baik, pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat akan menyerap tenaga kerja yang berkualitas yang mampu memperbaiki capaian indikator makro dan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

#### 4.5. Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Skor Efisiensi

Model ini dibangun untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi skor efisiensi. Model ini memodifikasi model yang dikembangkan oleh Afonso et al. (2005), Chan & Karim (2012) mengenai bagaimana pengaruh *government size*, investasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia (indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli) terhadap skor efisiensi penggunaan belanja sosial terhadap capaian pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat.

##### 4.5.1. Uji Hausman

Uji hausman menunjukkan *p-value* sebesar 0,0842 yang kurang dari alpha 5 persen sehingga analisis regresi menggunakan pendekatan *fixed effect*.

**Tabel 4–25. Uji Hausman Model Efisiensi**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.138814	6	0.0842

Sumber: hasil pengolahan data



#### 4.5.2. Output Pengolahan Data

Berikut merupakan hasil pengolahan data model pengaruh *government size*, investasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia (indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli) terhadap efisiensi penggunaan dana bantuan sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten dan Kota.

**Tabel 4–26. Output Regresi Model Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Skor Efisiensi**

Dependent Variable: EFSCORE?				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.783814	0.174084	4.502514	0.0000
GS?	-0.193576	0.112803	-1.716051	0.0889
LOG(INV?)	0.001962	0.001157	1.695143	0.0929
TPT?	-0.001747	0.000966	-1.807668	0.0734
IP?	-0.001399	0.000781	-1.789881	0.0762
IK?	0.004306	0.002887	1.491547	0.1387
IDB?	-0.000531	0.001202	-0.441776	0.6595
Weighted Statistics				
R-squared	0.119597	Mean dependent var	0.651421	
Adjusted R-squared	0.072008	S.D. dependent var	0.042190	
S.E. of regression	0.026743	Sum squared resid	0.079384	
F-statistic	2.513106	Durbin-Watson stat	1.559576	
Prob(F-statistic)	0.025578			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.182281	Mean dependent var	1.031592	
Sum squared resid	0.102608	Durbin-Watson stat	1.206589	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Secara sederhana, output pengolahan data pada tabel di atas dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut:

$$Es_{it} = 0.783814 - 0.193576 \cdot GS_{it} + 0.001962 \cdot \ln(INV)_{it} - 0.001747 \cdot TPT_{it} + 0.045206 \cdot IP_{it} - 0.001399 \cdot IK_{it} + 0.004306 \cdot \text{constant} - 0.000531 \cdot \text{error}_{it} + 0.026743$$

Hasil pengolahan data tersebut dapat disimpulkan dengan interpretasi koefisien regresi sebagai berikut:

- Koefisien regresi *government size* (GS?) menunjukkan nilai sebesar -0.193576. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan rasio belanja pemerintah terhadap PDRB sebesar 1 persen maka akan menurunkan skor efisiensi sebesar 0.193576 poin. *Ceteris paribus*.
- Koefisien regresi investasi ( $\ln(INV?)$ ) menunjukkan nilai sebesar 0.001962. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 1 persen maka akan meningkatkan skor efisiensi sebesar 0.001962 poin. *Ceteris paribus*.
- Koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka (TPT?) menunjukkan nilai sebesar -0.001747. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen maka akan menurunkan skor efisiensi sebesar 0.001747 poin. *Ceteris paribus*.
- Koefisien regresi indeks pendidikan (IP?) menunjukkan nilai sebesar -0.001399. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan indeks pendidikan sebesar 1 basis poin maka akan menurunkan skor efisiensi sebesar 0.001399 poin. *Ceteris paribus*.
- Koefisien regresi indeks kesehatan (IK?) menunjukkan nilai sebesar 0.004306. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan indeks kesehatan sebesar 1 basis poin

maka akan meningkatkan skor efisiensi sebesar 0.004306 poin. *Ceteris paribus*.

- Koefisien regresi indeks daya beli (IDB?) menunjukkan nilai sebesar - 0.000531. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan indeks daya beli sebesar 1 basis poin maka akan meningkatkan skor efisiensi sebesar 0.000531 poin. *Ceteris paribus*.

#### **4.5.3. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi merupakan nilai menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dependen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) pada model pengaruh *government size*, investasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap efisiensi penggunaan dana bantuan sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebesar 0.950454, artinya variabel Government Size, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia mampu menjelaskan skor efisiensi sebesar 95,05 persen, sedangkan 4,95 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### **4.5.4. Uji Signifikansi Parsial (Uji T-Statistik)**

Penggunaan uji T adalah untuk melihat adanya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu dalam tingkat signifikansi tertentu. Berikut merupakan nilai batas kritis untuk pengujian T-statistik model

pengaruh government size, investasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap efisiensi penggunaan dana bantuan sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebesar.

**Tabel 4–27. Hasil Pengujian T-Statistik Model Efisiensi**

Variabel	T-Stat	T-Tabel (n=130   k=7)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
GS?	-1.71605	2.35705	1.65734	1.28847	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
LOG(INV?)	1.695143	2.35705	1.65734	1.28847	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
TPT?	-1.80767	2.35705	1.65734	1.28847	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
IP?	-1.78988	2.35705	1.65734	1.28847	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
IK?	1.491547	2.35705	1.65734	1.28847	Ditolak	Signifikan pada $\alpha = 10\%$
IDB?	-0.44178	2.35705	1.65734	1.28847	Ditolak	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas menunjukkan seluruh variable independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capain skor efisiensi secara parsial.

- T-Hitung variabel government size sebesar -1.716051 lebih kecil dari (minus) T-Tabel untuk untuk alpha 5% (-1.65734) sehingga Ho ditolak. Maka variabel government size memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel efisiensi score pada tingkat kepercayaan 95 persen.

- T-Hitung variabel investasi sebesar 1.695143 lebih besar dari T-Tabel untuk untuk alpha 5% (1.65734) sehingga  $H_0$  ditolak. Maka variabel investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel efisiensi score pada tingkat kepercayaan 95 persen.
- T-Hitung variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar -1.80767 lebih kecil dari (minus) T-Tabel untuk untuk alpha 5% (1.65734) sehingga  $H_0$  ditolak. Maka variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel efisiensi score pada tingkat kepercayaan 95 persen.
- T-Hitung variabel indeks Pendidikan sebesar -1.789881 lebih kecil dari (minus) T-Tabel untuk untuk alpha 5% (1.65734) sehingga  $H_0$  ditolak. Maka variabel indeks Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel efisiensi score pada tingkat kepercayaan 95 persen.
- T-Hitung variabel indeks kesehatan sebesar 1.491547 lebih besar dari T-Tabel untuk untuk alpha 10% (1.28847) sehingga  $H_0$  ditolak. Maka variabel indeks kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel efisiensi score pada tingkat kepercayaan 90 persen.
- T-Hitung variabel indeks daya beli sebesar -0.441776 lebih besar dari minus T-Tabel untuk alpha 10% (-1.28847) sehingga  $H_0$  ditolak. Maka variabel indeks daya beli tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel efisiensi score.

#### 4.5.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Statistik)

Uji F-statistik digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari persamaan regresi atau untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat dalam persamaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tabel berikut menunjukkan hasil uji F Statistik pada model pengaruh government size, investasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap efisiensi penggunaan dana bantuan sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

**Tabel 4–28. Hasil Pengujian F-Statistik Model Efisiensi**

F-Stat	Prob	F-Tabel (df1 = k-1 = 7-1 = 6) (df2 = n-k = 130-7 = 123)			Ho	Keterangan
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$		
		2.51311	0	2.95		

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai F-Hitung model sebesar 53.21840 lebih besar dari F-Tabel untuk untuk alpha 1% (2.95) sehingga Ho ditolak. Maka seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama pada tingkat kepercayaan 99%.

#### 4.5.6. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan masalah yang terdapat pada variabel independen yang memiliki ikatan yang erat atau hubungan yang saling berpengaruh dalam model regresi. Sebuah model persamaan diindikasikan terdapat permasalahan multikolinearitas apabila  $R^2$  nya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada

variabel independennya yang signifikan pada pengujian t-statistik. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan analisis *pairwise matrix correlation* dengan kriteria jika nilai korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas.

**Tabel 4–29. Pairwise Matrix Correlation Model Efisiensi**

	<b>GS</b>	<b>INV</b>	<b>TPT</b>	<b>IP</b>	<b>IK</b>	<b>IDB</b>
<b>GS</b>	1.00	-0.45	-0.18	-0.03	-0.31	-0.32
<b>INV</b>	-0.45	1.00	0.02	0.00	0.19	0.23
<b>TPT</b>	-0.18	0.02	1.00	0.04	0.17	0.11
<b>IP</b>	-0.03	0.00	0.04	1.00	0.72	0.74
<b>IK</b>	-0.31	0.19	0.17	0.72	1.00	0.75
<b>IDB</b>	-0.32	0.23	0.11	0.74	0.75	1.00

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel independen yang memiliki nilai korelasi lebih dari 80 persen atau kurang dari -80 persen sehingga pada model pengaruh *government size*, investasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap efisiensi penggunaan dana bantuan sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas muncul karena varians dari setiap *error terms* tidak konstan. Konsekuensi dari masalah ini adalah bahwa penaksiran tidak lagi efisien karena memiliki varians yang tidak lagi minimum. Berikut merupakan hasil analisis uji *white heteroscedasticity* dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas.

- Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas
- Ha: Terdapat Heteroskedastisitas

Dengan kriteria:

- Jika  $Obs * R\text{-Squared} < Chi\text{-Squared Tabel}$  pada alpha 5% maka  $H_0$  Tidak Ditolak, Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
- Jika  $Obs * R\text{-Squared} > Chi\text{-Squared Tabel}$  pada alpha 5% maka  $H_0$  Tidak Ditolak

Berdasarkan hasil pengolahan data,  $Obs * R\text{-Squared} = 65.32708$  lebih kecil dari  $Chi\text{-squared Tabel}$  sebesar 149,885 sehingga  $H_0$  tidak ditolak dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### 4.5.7. Uji Autokorelasi

Masalah Autokorelasi dalam model merupakan masalah linear yang menunjukkan adanya korelasi antar anggota observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dalam menguji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* berikut.

**Gambar 4.15. Uji Durbin Watson Autokorelasi Model Efisiensi**



Sumber: Hasil Pengolahan Data



Dengan menggunakan jumlah observasi ( $n$ ) sebanyak 130 dan jumlah variabel independen ( $k$ ) sebanyak 7 variabel maka di dapat nilai  $DL = 1.6019$  dan  $DU = 1.8282$  sehingga dapat dihitung  $4-DU$  sebesar 2.1718 dan  $4-DL = 2.3981$ . Berdasarkan hasil estimasi, nilai *durbin watson* pada model ini adalah sebesar 1.2066 yang memiliki arti bahwa terdapat gejala autokorelasi negatif pada model pengaruh *government size*, investasi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap efisiensi penggunaan dana bantuan sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2014. Namun demikian, pada penelitian ini estimasi model telah dilakukan dengan metode EGLS (*Estimated Generalized Least Square*) dan juga menggunakan PCSE (*Panel Corrected Standard Errors*) dimana pada model ini masalah otokorelasi sudah diminimalisir yang ditunjukkan dengan nilai *durbin watson* statistik sebesar 1.5596 yang angka tersebut menuju area bebas autokorelasi.

#### **4.5.8. Analisis Terkait Peningkatan Efisiensi Penggunaan Belanja Sosial Terhadap LPE, Kemiskinan dan Ketimpangan.**

##### **4.5.8.1. Peran Pemerintah dan Pembangunan Manusia Untuk Efisiensi**

Urgensi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketimpangan yang rendah serta kemiskinan yang semakin menurun sudah dikemukakan oleh François Bourguignon (2004). Adapun pihak yang berkepentingan dan bertanggungjawab dengan kondisi 3 aspek tersebut adalah pemerintah. Publikasi BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rasio APBD terhadap PDRB yang rendah. Artinya, peran pemerintah masih jauh lebih

rendah dibandingkan dengan peranan masyarakat yang dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi dan investasi swasta. Namun demikian, studi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah yang direpresentasikan oleh *government size* memiliki dampak yang cukup baik bagi peningkatan efisiensi penggunaan belanja sosial terhadap capaian pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat.

Studi menunjukkan bahwa dari 6 variabel independen yang digunakan, seluruhnya memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Perbedaannya ada pada arah pengaruhnya. *Government size*, indeks pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif signifikan untuk membuat Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat mencapai skor yang lebih efisien. Artinya terjadinya peningkatan nilai dari 3 variabel tersebut berdampak pada nilai efisiensi yang lebih baik. Sedangkan peningkatan pada variabel investasi, indeks kesehatan dan indeks daya beli berdampak pada bergeraknya skor efisiensi ke arah yang lebih inefisien.

Adanya pengaruh negatif signifikan dari *government size* ini mendukung dengan pemikiran keyness dimana mekanisme pasar tidak bisa menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menangani fungsi stabilisasi, distribusi dan alokasi. Pemerintah dipercaya dapat menjalankan peran ini dibandingkan dengan dilepaskan 100 persen melalui mekanisme pasar.

Terkait dengan target capaian pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pemerintah tentu perlu menerapkan kebijakan strategis terutama yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (Castelló-Climent,

2010). Program-program yang berkaitan langsung dengan kualitas SDM seperti pendidikan dan kesehatan mutlak menjadi prioritas, tidak hanya prioritas dalam jumlah anggarannya saja namun juga prioritas terkait mutu dan kualitasnya.

Studi menunjukkan dari 3 variabel indeks pembangunan manusia, hanya indeks pendidikan yang berdampak pada lebih baiknya capaian skor efisiensi. Seharusnya ketiganya memiliki dampak pada lebih baiknya capaian skor efisiensi. Pelaksanaan program kesehatan dan peningkatan daya beli kurang optimal, baik itu yang dikarenakan oleh buruknya aspek efektifitas maupun tata kelola cenderung yang menjadi faktor besar yang membuat arah dari dampak indeks kesehatan dan daya beli tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya.

Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan di bidang kesehatan, seharusnya bisa dilakukan melalui program yang memperhatikan pentingnya 1.000 hari pertama yang memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek akan sangat berpengaruh pada perkembangan otak yang nantinya akan berpengaruh pada aspek kognitif dan prestasi belajar, pertumbuhan masa tubuh dan komposisi badan yang akan mempengaruhi daya tahan kapasitas kerja serta metabolisme glukosa dan hormon yang nantinya bisa mengakibatkan terserang penyakit seperti diabetes, obesitas, jantung dan lain-lain. Kondisi kesehatan yang terganggu tentunya tidak hanya disebabkan oleh aktifitas saat ini, namun juga ditentukan oleh perilaku di waktu-waktu sebelumnya. Di samping itu isu seperti stunting, tuberkolosis, kekurangan gizi dan beberapa permasalahan kesehatan lain juga perlu diprioritaskan.

Adapun dari sektor pendidikan, 20 persen anggaran baik itu APBN maupun APBD di alokasikan untuk sektor pendidikan. Namun demikian, sebagai representasi dari kondisi nasional, hasil pembelajaran terutama dalam indikator PISA (matematika,

IPA dan kemampuan membaca) Jawa Barat dan nasional pada umumnya masih berada di bawah negara-negara lain. Penekanan mutu pendidikan yang tidak hanya dilihat dari komitmen besarnya anggaran masih perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki capaian skor efisiensi yang dalam periode 2010-2014 memiliki kecenderungan semakin tidak efisien, pembenahan tata kelola dan optimalisasi capaian target di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masih memerlukan perbaikan yang signifikan.

#### **4.5.8.2. Perbaikan Iklim Investasi dan Pasar Tenaga Kerja Untuk Mendorong Kemampuan Daya Beli**

Sebagaimana yang tercantum pada konsep ilmu ekonomi bahwa produksi merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja (Jhingan, 2008). Setiap peningkatan modal dan tenaga kerja idealnya mampu meningkatkan produktivitas suatu daerah atau negara. Akan tetapi, dalam penelitian ini sebagai variabel yang tidak bisa dikontrol jumlahnya oleh pemerintah, investasi dan tingkat pengangguran terbuka serta indeks daya beli cenderung memiliki dampak yang meningkatkan inefisiensi penggunaan belanja sosial terhadap capaian pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Secara sederhana hal ini mungkin dikarenakan oleh tidak meratanya iklim investasi yang baik dan dampak buruk dari investasi yang terjadi di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat, kualifikasi angkatan kerja yang rendah sehingga hanya mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja tapi tidak mampu menjadi sumber peningkatan pendapatan per kapita serta tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki daya

beli yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kualitas hidupnya.

#### **4.6.Implikasi Kebijakan**

Jawa Barat yang maju sejahtera untuk semua merupakan sebuah visi yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Secara tidak langsung visi tersebut merupakan sebuah harapan yang terkait dengan terapan dari konsep ilmu ekonomi. Konsep maju direpresentasikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi, sejahtera merupakan representasi dari rendahnya tingkat kemiskinan serta untuk semua merupakan representasi dari rendahnya ketimpangan pendapatan. Namun demikian, target-target tersebut tentunya masih menjadi tantangan yang cukup berat untuk diselesaikan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Studi menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat tidak efisien dalam melakukan belanja sosialnya terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan serta ketimpangan pendapatan yang rendah. Metode DEA setidaknya mampu menggambarkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih jauh dari angka yang seharusnya dicapai. Terbatasnya analisis yang dihasilkan oleh metode DEA membuat studi ini melakukan analisis regresi yang menghasilkan rekomendasi bagi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan skor efisiensinya dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Negatifnya pengaruh *government size* terhadap skor efisiensi memiliki arti bahwa semakin tinggi rasio APBD terhadap PDRB akan membuat Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat mengarah pada penggunaan belanja sosial yang lebih efisien. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, distribusi dan alokasi, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota perlu meningkatkan belanja yang efektif dan efisien. Besarnya pengeluaran ini tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar penerimaan daerah yang diperoleh. Dengan demikian, upaya peningkatan penerimaan daerah melalui pajak dan beberapa sumber pendapatan lainnya perlu diperhatikan secara seksama sehingga mampu mendongkrak kemampuan belanja Pemerintah terkait layanan publik secara adil dan merata sehingga manfaat pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.
- 2) Pemerintah perlu memperhatikan nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan peranan sektor pendidikan dan kesehatan dalam memaksimalkan manfaat dari pengeluaran pemerintah khususnya belanja sosial. Studi ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan mampu mendorong Kabupaten Kota menuju skor efisiensi yang lebih baik.
- 3) Perbaikan di sektor pendidikan perlu memperhatikan berbagai aspek potensi dan permasalahan di bidang pendidikan seperti guru, sekolah, masyarakat sampai dengan pemerintah daerahnya itu sendiri. Anggaran pendidikan ini tentunya harus mampu menghasilkan manfaat yang tinggi untuk kemajuan SDM di tingkat daerah sehingga perlu meningkatkan kerja sama di antara guru, sekolah, masyarakat sampai dengan pemerintah daerahnya untuk terciptanya suatu sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

4) Perbaikan di sektor kesehatan tentunya harus dimulai sedini mungkin dengan memperhatikan pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. Pemerintah perlu melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif untuk memaksimalkan manfaat tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Intervensi ini diharapkan mampu menghasilkan generasi penerus yang memiliki kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi sehingga di masa depan dapat meningkatkan daya saing daerah dan negara untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

- Intervensi gizi spesifik: (1). upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung, (2). Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, (3). Kejadiannya antara lain seperti imunisasi, pemberian makanan ibu hamil dan balita, *monitoring* pertumbuhan balita di Posyandu, (4). Memiliki sasaran khusus kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
- Intervensi gizi sensitif: (1). upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung, (2). Melalui berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non-kesehatan, (3). Kejadiannya antara lain penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender, (4). Memiliki sasaran bagi masyarakat umum dan tidak khusus untuk kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan

5) Kurang baiknya dampak dari investasi dan tingkat pengangguran terbuka mengharuskan pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait regulasi investasi

dan kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah mutlak harus membuat regulasi yang mampu memperbaiki iklim investasi dan peningkatan standar hidup tenaga kerja.

- 6) Perbaikan iklim investasi minimal bisa dimulai dengan perbaikan dalam administrasi dan kemudahan perizinan, peningkatan kualitas dan opsi sarana dan prasarana (infrastruktur) serta penyediaan insentif bagi investor yang tidak berlebihan. Secara umum kebijakan perbaikan iklim investasi harus mampu menyelesaikan permasalahan ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomi makro. Dengan demikian, hal ini diharapkan mampu mendorong tingkat investasi yang mampu memberikan dampak terhadap produktifitas dan kualifikasi tenaga kerja di Jawa Barat.
- 7) Perbaikan di pasar tenaga kerja tidak hanya mengacu pada semakin banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi aktifitas ekonomi namun juga diperlukan kebijakan yang mampu meningkatkan standar hidup tenaga kerja. Program pelatihan keahlian dan sertifikasi dari Balai Latihan Ketenagakerjaan harus menasar kelompok menengah ke bawah sehingga mampu meningkatkan kualifikasi pendidikan guna mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sampai dengan saat ini masih menjadi komponen utama yang menjadi target pembangunan. Tidak hanya pada tingkat lokal, nasional namun saat ini ketiganya masuk ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus selesai di tahun 2030. Melihat urgensi tersebut, negara-negara di dunia termasuk pemerintah



daerah di dalamnya berupaya keras untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan kemiskinan sampai dengan ke titik nol dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pada akhirnya studi ini mengerucut pada temuan dimana penggunaan belanja pemerintah daerah harus mampu menghasilkan program-program yang bertanggungjawab, tepat sasaran dan berkelanjutan guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki manfaat untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan untuk Provinsi Jawa Barat yang sejahtera, maju dan adil untuk semua.